

LAPORAN PENELITIAN PAYUNG



**PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL DI
VORSTENLANDEN**

**Oleh:
Prof. Dr. Husain Haikal
Drs. Djumarwan
Ita Mutiara Dewi, M.Si.
Desyari Widi Astuti
Hermawan Dwi S.**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Alamat: Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281
Tlp.548202, 586168. psw. 247, 248

PENGESAHAN USULAN PENELITIAN

1. Judul Penelitian	PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL DI VORSTENLANDEN
2. Jenis Penelitian	Penelitian Payung
3. Peneliti a. Nama Lengkap dan Gelar b. NIP c. Jenis Kelamin d. Pangkat/Jabatan/Golongan e. Fakultas/Jurusan f. Institut/Universitas g. Alamat	Prof. Dr. Husain Haikal Laki-laki Guru Besar/IV Ilmu Sosial /Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta Kampus FIS UNY Karangmalang Jalan Gejayan Gang Guru No. 1 Depok, Sleman, DIY
4. Jumlah Tim Peneliti Inti	4 Orang (2 Peneliti, 2 mahasiswa)
5. Lokasi Penelitian	-
6. Kerja dengan Instansi Lain	-
7. Lama Penelitian	3 bulan, dari bulan Oktober sampai Desember 2012
8. Biaya yang diperlukan a. Sumber Dana Depdiknas b. Sumber Lain Jumlah	Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)

Yogyakarta, 22 Oktober 2012
Peneliti,

Prof. Dr. Husain Haikal
NIP.

Mengetahui:
Ketua Jurusan Pend. Sejarah

Dekan FIS UNY

Prof. Dr. Ajat Sudrajat
NIP.

M. Nurrohman, M.Pd.
NIP.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan laporan penelitian ini

Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam laporan ini, baik dalam penyajian materi, penulisan, dan sebagainya. Oleh karena itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pun berharap agar laporan penelitian yang telah dikerjakan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kami sendiri sebagai penulis maupun bagi para pembaca.

Yogyakarta, 14 November 2012

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kajian Pustaka	6
1.6. Historiografi yang Relevan	9
1.7. Metode dan Pendekatan Penelitian	12
1.8. Data Diri Peneliti	20
1.9. Langkah Dan Jadwal Kegiatan	22
1.10. Perkiraan Biaya Penelitian	23
BAB II PENDIDIKAN DI VOSTENLANDEN	24
2.1. Vorstenlanden	24
2.2. Pendidikan di Vorstenlanden	30
BAB III PERUBAHAN SOSIAL DAN KOTA DI VORSTENLANDEN	54
3.1. Perubahan Sosial Di Vorstenlanden	59
3.2. Perubahan Kota di Vorstenlanden	69
BAB IV KESIMPULAN	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.7. Latar Belakang Masalah

Perubahan sosial akan selalu menjangkau ke segala lini kehidupan manusia, termasuk sektor pendidikan. Perubahan sosial akan mempengaruhi segala aktivitas maupun orientasi pendidikan yang berlangsung. Intervensi kekuatan proses tersebut juga mencakup semua proses pendidikan yang terjadi di berbagai aspek lain masyarakat, baik dari tingkat mendasar yaitu keluarga sampai interaksi antar pranata sosial. Sebagai bagian dari pranata sosial, tentunya pendidikan akan ikut terjaring dalam hukum-hukum perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Sebaliknya, pendidikan sebagai wadah pengembangan kualitas manusia dan segala pengetahuan tentunya menjadi agen penting yang ikut menentukan perubahan sosial masyarakat ke depan. Karena perubahan sosial mengacu pada kualitas masyarakat sementara kualitas masyarakat tergantung pada kualitas pribadi-pribadi anggotanya maka tentunya lembaga pendidikan memainkan peranan yang cukup signifikan menentukan sebuah perubahan sosial yang mengarah kemajuan. Oleh karena itu, sejarah Indonesia sejak masa kolonial tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang dinamika pendidikan dan perubahan sosial.

Sistem kolonisasi pemerintah Belanda yang merajalela di bumi nusantara telah membawa dampak yang luas bagi perkembangan modernisasi di berbagai

bidang, termasuk komunikasi, transportasi, dan edukasi. Keadaan tersebut menimbulkan mobilisasi sosial yang lebih tinggi serta memunculkan golongan intelegensia. Sistem kolonisasi yang diadakan oleh Belanda bersamaan dengan diperkenalkan bentuk-bentuk pendidikan modern. Mereka diajarkan berbagai keterampilan, diantaranya membaca dan menulis huruf latin, berhitung, dan keterampilan-keterampilan praktis lainnya seperti pertukangan dan pertanian yang banyak dilaksanakan di sekolah-sekolah. Pendidikan ini oleh Belanda hanya diperuntukkan untuk golongan tertentu saja, yaitu anak dari bangsawan, priyayi, atau pembesar negara.

Dalam catatan sejarah Indonesia selama masa kolonial Belanda berkuasa, terjadi beberapa kali pergantian haluan politik. Pertama politik konservatif, terutama dijalankan pada masa tanam paksa tahun 1830-1870. Dalam politik kolonial ini peranan negara hanya terbatas pada persoalan menjaga ketertiban hukum keteraturan masyarakat, sedangkan urusan perekonomian dijalankan oleh swasta, yang kemudian mendorong tumbuhnya berbagai perusahaan swasta di Indonesia. Baik politik kolonial konservatif maupun politik kolonial liberal dianggap tidak ada bedanya, karena hasil dari kedua kebijaksanaan politik tersebut tidak dapat dinikmati oleh penduduk pribumi.

Awal abad XX, kebijakan penjajahan Belanda mengalami perubahan arah yang paling mendasar. Eksploitasi terhadap Indonesia mulai berkurang sebagai pembenaran utama kekuasaan Belanda, digantikan dengan pernyataan-pernyataan keprihatinan atas kesejahteraan bangsa Indonesia. Dalam hal ini muncul kebijaksanaan politik yang ketiga yaitu Politik Kolonial Etis 1900-1942. Politik

Etis mengubah pandangan dalam politik kolonial yang beranggapan Indonesia diubah menjadi daerah yang perlu dikembangkan, melalui tiga prinsip dasar, yaitu pendidikan, perpindahan penduduk, dan pengairan.¹ Dari ketiga prinsip dasar tersebut, pendidikanlah yang mempunyai peran penting bagi penduduk pribumi.

Sebelum muncul Politik Etis, yaitu sekitar pertengahan abad XIX, rencana pengajaran untuk penduduk pribumi sebenarnya sudah ada, tetapi ketika itu hanya sedikit sekali tindakan dilakukan. Setelah munculnya peraturan pemerintah tahun 1818 orang-orang pribumi baru diperbolehkan masuk sekolah-sekolah Belanda. Pemerintah juga menetapkan peraturan tata tertib yang diperlukan untuk sekolah-sekolah bagi penduduk pribumi. Peraturan tersebut tidak berarti apa-apa, baru tahun 1848 Gubernur Jenderal menerima kuasa untuk menggunakan biaya sebesar f 25.000 setiap tahunnya untuk pendirian sekolah-sekolah bagi kalangan Jawa khususnya. Pada tahun 1863 Menteri Fransen van De Putte telah menetapkan bahwa harus diupayakan suatu keadaan di mana penduduk pribumi diberi kesempatan untuk memperoleh pengajaran.² Tahun 1893 dibentuk dua jenis sekolah dasar untuk kaum Bumiputera, yaitu Eerste Klass Inlandsche Scholen atau sekolah Bumiputera Angka Satu dan Tweede Klass Inlandsche Scholen atau sekolah Bumiputera Angka Dua. Setelah Politik Etis mulai diberlakukan tahun 1900, gagasan mengenai pendidikan di Indonesia mulai memperoleh dukungan dari Gubernur Jenderal Van Hents (904-1908) dan Dirk Fock yang menjabat sebagai menteri urusan daerah jajahan (1905-1908) di negeri Belanda. Hal ini

¹ Marwati Djoened Poesponegoro, et. El. *Sejarah Nasional Indonesia V*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hlm. 37.

² S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Di Indonesia*. (Bandung: Jemmars, 1983), hlm. 15.

dibuktikan dengan bertambah banyaknya sekolah-sekolah yang disediakan untuk rakyat Bumiputera.

Kebijaksanaan Politik Etis berlaku di seluruh wilayah kolonial Belanda termasuk Surakarta dan Yogyakarta. Pada saat itu wilayah Surakarta dan Yogyakarta dianggap berbeda dengan wilayah Jawa lainnya, karena merupakan tempat kedudukan empat kerajaan yang berdiri sendiri dibawah kekuasaan negara kolonial Belanda. Kedua wilayah tersebut dinamakan Vorstenlanden atau wilayah raja-raja (*princely state*). Di mana Surakarta mempunyai dua keraton, yaitu Kasunanan dan Mangkunegara, dan Yogyakarta juga mempunyai dua keraton, yaitu Pakualaman dan Kasultanan.

Perkembangan kota di Indonesia termasuk Surakarta dan Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari aspek historis Vorstenlanden tersebut. Menurut Djoko Suryo³ salah satu persoalan rumit yang dihadapi kota-kota di Indonesia pada masa kini adalah persoalan penduduk, tanah dan lahan pemukiman usaha. Paling tidak pada sekitar 1900-an isu tentang peledakan penduduk, kemiskinan, lapangan pekerjaan dan perumahan serta gejala urbanisasi mulai mengemuka di Jawa, sebagaimana tercermin dalam isu tentang *Mindere Welvaart* (Kemerosotan Kemakmuran) yang muncul pada masa itu. Isu-isu itu mengundang tuntutan perbaikan kebijakan dari pihak pemerintah.

Kebijakan Politik Etis dengan trilogi programnya, yaitu pendidikan, emigrasi dan irigasi, dan kebijakan Perbaikan Kampung (Kampung *Verbeteringen*), penanggulangan kesehatan, pendirian Lumbung Desa, Bank

³Djoko Suryo, *Penduduk Dan Perkembangan Kota Yogyakarta 1900-1990, Kota Lama, Kota Baru*, (Yogyakarta: Ombak, 2005), hlm. 30.

Perkreditan Rakyat, dan lainnya yang dilancarkan pada sekitar dua dekade pertama awal abad ke-20 merupakan solusi penting terhadap persoalan yang mengemuka pada masa itu. Hal tersebut melatarbelakangi perkembangan kota-kota di Indonesia.

1.8. Rumusan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan tetap berada pada lingkup yang sesuai serta selalu terarah, diperlukan beberapa pertanyaan yang membatasi masalah ini, sehingga dapat dicapai solusi yang tepat pada pokok permasalahan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah ini adalah?

1. Bagaimana dinamika pendidikan di Vorstenlanden?
2. Bagaimana perubahan sosial di Vorstenlanden?
3. Bagaimana perubahan kota di Vorstenlanden?

1.9. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Sebagai sarana efektif dalam upaya penerapan metodologi penelitian sejarah.
- b. Untuk melatih daya pikir yang kritis analisis serta objektif dalam menganalisa suatu peristiwa sejarah.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan pendidikan pada masa Vorstenlanden.

- b. Mendeskripsikan perubahan sosial pada masa Vorstenlanden
- c. Mendeskripsikan perubahan kota pada masa Vorstenlanden

1.10. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai tolak ukur kemampuan dalam meneliti menganalisa dan merekonstruksi suatu penulisan sejarah.
- b. Sebagai sarana memperluas wawasan tentang Vorstenlanden

2. Bagi Pembaca

- a. Sebagai sarana untuk memperluas wawasan tentang pendidikan, perubahan sosial dan perubahan kota di Vorstenlanden
- b. Menambah wawasan kesejarahan pembaca sehingga dapat menilai secara kritis dan objektif terhadap peristiwa-peristiwa bersejarah bangsa Indonesia yang lain pada masa lampau.

1.11. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini digunakan beberapa sumber referensi yang dapat dijadikan acuan penelitian dan sebagai kerangka teori dalam pemahaman penulis mengenai obyek yang diteliti, antara lain :

Karya dari Robert Van Niel, yang berjudul *Munculnya Elite Modern*, 1984, menjelaskan mengenai Politik Etis dalam konsepnya merupakan suatu tujuan yang mulia akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak demikian. Pendidikan yang dituntut untuk mengangkat harkat martabat penduduk bumiputera dari

kebodohan ternyata banyak ditujukan untuk mencetak tenaga kerja pada administrasi dan birokrasi Belanda serta sebagai buruh dalam perusahaan-perusahaan swasta asing. Dengan segala kelemahan Politik Etis menurut Van Niel telah mendorong perubahan sosial dikalangan penduduk pribumi. Hal tersebut disebabkan banyaknya penduduk pribumi yang mengenyam pendidikan Barat, sebagai suatu cara untuk merubah pemikiran yang tradisional. Dengan demikian, salah satu aspek yang terpenting dalam Politik Etis bagi perkembangan penduduk Hindia Belanda adalah pada bidang pendidikan.

Karya dari S. Nasution, dalam bukunya *Sejarah Pendidikan Indonesia*, 2001, menjelaskan tentang penyelenggaraan pendidikan kolonial dan sekolah-sekolah yang berdiri masa itu. Uraianya terutama difokuskan pada suatu periode tertentu, dalam sejarah pendidikan Indonesia yakni periode 1892-1920. Dalam periode inilah dapat dilihat terbentuknya suatu sistem pendidikan yang lengkap di Indonesia yang memungkinkan anak Indonesia belajar dari tingkat sekolah paling rendah sampai menyelesaikannya pada tingkat yang paling tinggi. Buku ini terbagi menjadi sebelas bab, pada bab pertama membahas mengenai pandangan umum tentang politik dan penyelenggaraan pendidikan kolonial, antara lain mengenai politik Etis dan beberapa ciri umum politik pendidikan Belanda.⁴ Bab dua sampai sepuluh menjelaskan tentang sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu sekolah untuk anak Indonesia sebelum reorganisasi 1892, Sekolah Kelas Satu, Sekolah Kelas Dua, ELS, HCS, HIS, MULO, HBS, dan AMS. Dijelaskan pula mengenai kurikulum, buku pelajaran,

⁴ S. Nasution, *op.cit.*, hlm. 3.

guru-guru, murid-murid di sekolah-sekolah tersebut. Pada bab terakhir membahas tentang pendidikan tinggi dan perkembangan suatu sistem pendidikan di Indonesia.

Tulisan lain yang banyak membahas masalah pendidikan adalah buku karya Soegarda Poerbakawatja yang berjudul *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*. Hasil karya Soegarda ini menguraikan tentang pendidikan di Indonesia selama tiga masa pemerintahan yang berbeda. Pertama pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang pembahasannya dimulai pada saat diberlakukannya Politik Etis. Yang kedua adalah perkembangan pendidikan pada masa pendudukan Jepang, dimana pendidikan pada masa itu mengalami kemerosotan. Di samping diliputi oleh suasana perang, urusan pendidikan juga dicampuradukkan dengan urusan pemerintahan. Ketiga adalah perkembangan pendidikan setelah Indonesia merdeka yang di dalamnya membahas kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan. Usaha pemerintah untuk meningkatkan pendidikan antara lain: memperbaiki sistem pendidikan yang sebelumnya dianggap kurang memenuhi syarat, selain itu pemerintah juga mengeluarkan UU pendidikan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia agar sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.

Karya Djoko Suryo tentang *Penduduk Dan Perkembangan Kota Yogyakarta 1900-1990, Kota Lama, Kota Baru*, menyatakan bahwa perubahan yang berkenaan dengan administrasi pemerintahan, partai politik, pertanian, perkebunan rakyat, perkembangan teknologi, perkembangan pendidikan, kemunculan perusahaan asing yang semua itu dapat mengubah kehidupan sosial

masyarakat Kota Yogyakarta pada akhir zaman Kolonial Belanda. Perubahan sosial banyak dialami oleh masyarakat Kota Yogyakarta waktu itu, akan tetapi ada satu hal unik, yaitu pengalaman perubahan ibukota Kasultanan Yogyakarta yang biasa hidup tenang dan tradisional menjadi ibukota Republik Indonesia. Selain itu, Yogyakarta juga menjadi markas besar revolusi nasional Republik Indonesia. Maka kota yang biasanya menjadi tempat pemerintahan daerah yang relatif kecil dengan mendadak menjadi kota pemerintahan pusat untuk seluruh tanah air.

Tulisan Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial Di Yogyakarta*, menguraikan tentang kota-kota kuno biasanya berdiri di dekat pusat pemerintahan yang berfungsi memberikan perlindungan kepada penduduknya. Kota-kota kuno biasanya berpusat pada keraton sebagai tempat tinggal sang penguasa. Tempat tinggal raja juga merupakan kompleks bangunan tempat bekerja para pendeta, pegawai administrasi dan para seniman. Perbenturan budaya antara kekuatan tradisional dengan kekuatan kolonial membawa modernisasi.

1.7. Historiografi yang Relevan

Dalam membuat suatu karya ilmiah, terutama dalam tataran penulisan sejarah, yang utama perlu diperhatikan adalah penggunaan sumber penulisan. Seorang sejarawan harus menggunakan sumber-sumber yang benar-benar valid dan terpercaya kebenarannya. Menurut Louis Gottschalk, selain menggunakan sumber-sumber yang tercetak (misalnya buku), sejarawan juga harus

menggunakan banyak material yang tidak terdapat di dalam buku-buku.⁵ Historiografi adalah usaha dari sejarawan untuk merekonstruksi sebanyak-banyaknya peristiwa masa lampau. Peristiwa pada masa lampau ini tentunya harus memiliki batasan antara sesuatu yang benar-benar terjadi dan imajinasi.⁶ Sejarawan perlu memastikan bahwa rekaman-rekaman pada masa lalu yang akan dikaji memang benar-benar terjadi.

Karya Aga Kristaning Jati yang berjudul *Pengaruh Studiefonds Terhadap Kemajuan Pendidikan Wanita Di Mangkunegaran Tahun 1912-1940*. Skripsi ini menjelaskan tentang perkembangan pendidikan di Mangkunegaran dengan didukung adanya *Studiefonds* untuk anak-anak pegawai Mangkunegaran yang kurang mampu. *Studiefonds* terdiri dari dua jenis yaitu *Studiefonds A* untuk anak-anak pegawai Mangkunegaran dan *Studiefonds B* untuk anak-anak bumiputera. *Studiefonds* ini berlaku untuk murid laki-laki dan wanita. Keikutsertaan wanita dalam memperoleh pendidikan dan *Studiefonds* merupakan bentuk pembaharuan dalam bidang pendidikan oleh mangkunegara VII. Tujuannya agar kaum wanita ketika berumah tangga dapat menjadi rekan kerja untuk suaminya dan dapat mendidik anak-anaknya. Pembaharuan yang dilakukan Mangkunegara VII ini mendapat respon yang baik dari kaum wanita. Minat kaum wanita untuk melanjutkan pendidikanpun menjadi besar. Pada tahun 1919-1945 tercatat 70 murid wanita yang mendapatkan *Studiefonds* untuk melanjutkan sekolahnya. Adanya *Studiefonds* membantu anak-anak kurang mampu secara ekonomi namun

⁵ Louis Gottschalk, *Understanding History*, terj. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1975), hlm. 35.

⁶*Ibid.*, hlm. 32.

memiliki tekad yang besar untuk melanjutkan sekolahnya. Pendidikan dan *Studiefonds* untuk kaum wanita membantu mereka dalam memerangi keterbelakangan yang sebelumnya mereka alami. Kemajuan yang diperoleh kaum wanita setelah mendapatkan pendidikan dan *Studiefonds* adalah turut berpartisipasinya mereka untuk mengajar dan mendidik anak-anak di sekolah-sekolah seperti sekolah Sisworini.

Thesis karya Insiwi Febriary yang berjudul *Pemikiran K.G.P.A.A. Magkunegoro VII Tentang Pendidikan Wanita dan Kebudayaan 1916-1944*. Thesis ini menjelaskan tentang seorang Mangkunegara VII dengan pemikirannya dari mulai masih kecil hingga menjadi raja Mangkunegaran. Pembaharuan yang dilakukan oleh Mangkunegara VII diantaranya bidang kesehatan, irigasi, kebudayaan, ekonomi, dan pendidikan. Perhatian Mangkunegara VII khususnya dalam bidang pendidikan tertuju pada pendidikan untuk kaum wanita. Sebelum munculnya modernisasi kehidupan wanita di istana Mangkunegaran sangat terbatas dengan segala peraturan yang ketat. Untuk memperoleh pendidikan saja mereka dibedakan dengan kaum laki-laki. Wanita hanya dibekali pengetahuan tentang masalah kerumahtanggaan dan tidak layak memiliki pekerjaan atau pengetahuan yang luas di dunia luar. Setelah modernisasi muncul atas prakarsa Mangkunegoro VII serta pemikiran R.A. Kartini batasan-batasan tersebut mulai memudar.

Karya yang berjudul *Pengaruh Studiefonds Terhadap Kemajuan Pendidikan Wanita Di Mangkunegaran tahun 1912-1940*. Dalam karya ini dijelaskan mengenai *Studiefonds* Mangkunegaran yang meliputi latar belakang

pencetuskan *Studiefonds* dan mengenai keberadaan *Studiefonds* mangkunegaran berupa berdirinya, tujuan, syarat, dan pelaksanaannya dan menjelaskan bagaimana dampak dan kontribusi dari wanita yang menerima *Studiefonds* tersebut. Selain itu juga dijelaskan tentang sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan *Studiefonds* Mangkunegaran.

Tesis karya Tiwuk Kusuma Hastuti, Sekolah Pascasarjana UGM tahun 2006 yang berjudul *Tanah Sende Dan Dinamika Sosial Ekonomi Petani (Studi Kasus di Yogyakarta Pada Awal Abad XX)*. Dalam tesis ini dijelaskan bahwa tingkat sosial masyarakat Yogyakarta berdasarkan dari kepemilikan tanah serta menjelaskan kehidupan sosial ekonomi masyarakat petani yang ada di Yogyakarta.

Skripsi karya Rina Kundari Ilmu Sejarah FIS UNY berjudul *Perkembangan Koperasi di Yogyakarta Tahun 1950-1965*. Skripsi ini membahas tentang peran koperasi di Yogyakarta dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Yogyakarta. Skripsi ini erat kaitannya dengan pembahasan yang akan diuraikan penulis tentang perubahan sosial masyarakat terhadap perkembangan kota Yogyakarta, terutama dalam bidang sosial dan perekonomian masyarakat Yogyakarta pada tahun 1950-1960.

Skripsi karya Hery Agus Santoso jurusan Ilmu Sejarah FIB UGM 2005, tentang *Pertumbuhan Sosial Akibat Pertumbuhan Industri Kerajinan Keris, "Di Dusun Banyu Sumurup Desa Girirejo Kecamatan Imogiri Bantul 1972-2000"*. Skripsi ini membahas bagaimana peranan kemajuan industri dalam pembuatan

keris. Perkembangan industri mengakibatkan perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

1.8. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian historis, yaitu mencari, menemukan, dan menguji sumber-sumber sehingga mendapatkan fakta sejarah yang otentik dan dapat dipercaya. Langkah-langkah penelitian dalam metode sejarah terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan diakhiri dengan penulisan/historiografi.⁷

1. Heuristik

Heuristik adalah sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, atau evidensi sejarah.⁸ Sumber-sumber yang akan dikumpulkan tentunya berkaitan dengan tema yang akan dikaji. Sumber merupakan hal yang penting dalam penyusunan karya sejarah. Tanpa adanya sumber, peristiwa sejarah tidak akan dapat direkonstruksi menjadi sebuah kisah. Seperti Sartono Kartodirdjo memaparkan bahwa sumber penelitian sejarah merupakan modal utama untuk menyusun peristiwa sejarah, karena dari sumber itu dapat ditarik fakta yang kemudian menjadi dasar usaha untuk menghidupkan masa lampau.⁹ Tanpa adanya sumber, sebuah karya sejarah dapat dikatakan

⁷ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 89.

⁸ *Ibid.*, hlm. 86.

⁹ Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi*, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 23.

sebagai cerita rekaan. Helius Sjamsuddin menganggap sumber sejarah sebagai hal yang berkaitan langsung atau tidak, yang menceritakan kepada kita ikhwal suatu kenyataan atau kegiatan manusia.¹⁰ Sumber di dalam sejarah dapat dibedakan menjadi dua: sumber primer dan sumber sekunder.

a). Sumber Primer

Menurut Louis Gottschalk, sumber primer adalah kesaksian seseorang dengan mata kepala sendiri, yaitu saksi dengan panca indera, atau alat mekanis (yang juga bisa menghasilkan suatu rekaman yang bisa di indera).¹¹ Serupa dengan itu John W. Best berpendapat bahwa sumber primer adalah sumber cerita atau catatan saksi mata atau pengamat, berisi catatan para saksi yang menyaksikan suatu peristiwa.¹² Sumber primer dapat pula diartikan sebagai suatu sumber cerita atau catatan saksi mata atau pengamat, berisi catatan para saksi yang menyaksikan suatu peristiwa.

Sumber primer yang akan digunakan di sini adalah (1) berkaitan dengan penelitian pendidikan di Vorstenlanden: arsip-arsip perpustakaan Mangkunegaran yang membahas tentang kepemimpinan Mangkunegoro VI dan Mangkunegoro VII, pendidikan dan sekolah-sekolah yang didirikan oleh kadipaten Mangkunegaran, serta mengenai pencetusan *studiefonds* Mangkunegaran. Arsip lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rijksblad Mangkunegaran tahun 1917 No.33 mengenai peraturan Sekolah pamulangan Bocah Wadon, berkas-berkas permohonan *studiefonds*, arsip Mangkunegaran mengenai jumlah

¹⁰ Helius Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 80.

¹¹ Louis Gottschalk, *op. cit.*, hlm. 35.

¹² John W. Best, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 31.

murid wanita di van Deventersch, Frobelkweeksch, I.E.V. Kweekschool, dan Huishoudschool tahun 1926-1935. (2) berkaitan perubahan sosial di Vorstenlanden yaitu Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (PERDA DIY) nomor 5 tahun 1954 (5/1954) tentang hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (PERDA DIY) nomor 3 tahun 1951 (3/1951) tentang Upah buruh Pemerintah, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (PERDA DIY) nomor 4 tahun 1956 (4/1956) tentang Penghapusan Maklumat-Maklumat Pemerintah Pendudukan Jepang di Yogyakarta.

b.) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan saksi pandangan mata. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber sekunder (sebagian yang terpenting) adalah sebagai berikut :

1.) Buku

Baudet, H, Brugman, I J, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.

Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1839*, Yogyakarta: Taman Siswa, 1989.

Gouda, Frances, *Dutch Culture Overseas: Colonial Practice in the Netherlands Indies 1900-1942*, a. b. Jugiarie Soegiarto dan Suma Riella Rusdiarti, *Durch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942*, Jakarta: Serambi, 2007.

- Larson, George D, *Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*, Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 1990.
- Metz, T.H M, *Mangkunagaran : Analisis Sebuah Kerajaan Jawa*, Surakarta: Reksa Pustaka.
- S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi aksara, 2001.
- Sartono Kartodirjo, *Perkembangan Peradaban Priyayi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1993.
- Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakrta: Gunung Agung, 1970.
- Abdurrachman Surjomiharjo, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.
- Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Heddy Shri Ahimsa Putra., et al, *PerubahanPola Kehidupan Masyarakat Akibat Pertumbuhan Industri Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Dekdibud, 1990.
- Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.
- Soedarisman Poerwokoesoemo, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 1984.

2.) Jurnal, Majalah, dan Surat Kabar

. Hilmiyah Darmawan, “Peranan Wanita Mangkunegaran dari Masa ke Masa”, *Makalah dalam Pertemuan HKMN cabang Surakarta*, Februari 1993.

Hilmiyah Darmawan & M. Thoyibi, “Peranan Wanita Jawa Abad 18 dalam Visi Mangkunegara I”, *Makalah dalam Simposium Nasional*, Surakarta: UMS, 1989.

2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Setelah sumber ditelusuri dan didapatkan, langkah selanjutnya adalah mengkritisi sumber tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat tidak semua sumber dapat digunakan dalam sebuah historiografi. Agar sumber tersebut bisa dipakai dia harus melewati dua kali pemeriksaan, yaitu kritik eksternal dan kritik internal.¹³

a). Kritik Eksternal

Kritik sumber dilakukan untuk mencari keabsahan data dengan melakukan penyaringan secara kritis. Menurut Kuntowijoyo tujuan kritik ekstern untuk menilai keabsahan sumber, misalnya jenis kertas, tinta, gaya tulisan, bahasa, kalimat, untuk mengetahui otentitas sumber.¹⁴ Kritik eksternal

b). Kritik Internal

¹³ R. Moh Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 246.

¹⁴ Kuntowijoyo, *op. cit.*, hlm. 101.

Selain melakukan kritik eksternal peneliti juga melakukan kritik intern untuk mengetahui validitas isi sumber.¹⁵ Kritik ini merupakan pemeriksaan terhadap isi sumber yang bertujuan untuk membuktikan apakah kesaksian dan pernyataan sumber dapat diandalkan atau tidak.¹⁶ Untuk mendapatkan pembuktian ini dapat ditempuh melalui dua cara. Pertama, mengetahui isi dari catatan selama perjalanan pelaku atau saksi. Kedua, mengetahui apakah sumber tersebut jujur atau tidak. Kedua hal ini begitu terasa penting ketika sumber itu menggunakan kata kiasan. Untuk mengetahui jujur tidaknya sumber tersebut perlu juga diperbandingkan pernyataannya dengan sumber lain yang sependapat atau tidak.¹⁷

Sumber-sumber yang ada dalam penelitian ini telah melalui kritik internal ini. Sumber-sumber tersebut telah di teliti satu sama lainnya. Sebagian sumber di atas juga telah lolos seleksi yang sama oleh peneliti lainnya sehingga dapat menjadi bahan acuan dalam penulisan skripsi.

3. Interpretasi

¹⁵ *Ibid*, hlm. 102.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 135.

¹⁷ Helius Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 252.

Penafsiran atas fakta-fakta sejarah, mencari hal yang saling berhubungan antara fakta yang satu dengan lainnya sehingga rangkaian fakta tersebut bermakna dan logis.¹⁸ Menurut Kuntowijoyo, interpretasi yaitu penafsiran atas fakta-fakta sejarah mencari hal yang saling berhubungan antara fakta yang satu dengan yang lainnya sehingga rangkaian tersebut bermakna dan logis. Subjektivitas sejarawan dikatakan terletak pada tahapan interpretasi. Subjektivitas sejarawan memang diakui tapi harus dihindari.¹⁹

Interpretasi ini merupakan kegiatan penelitian untuk menghubungkan fakta-fakta sejarah yang diperoleh setelah melalui kritik baik intern dan ekstern. Pada tahap ini berbagai fakta yang lepas satu sama lain dirangkum dan dihubung-hubungkan sehingga menjadi kesatuan yang harmonis serta masuk akal. Peristiwa-peristiwa lain yang melingkupinya.²⁰ Setelah sumber diseleksi selanjutnya dilakukan tahapan sintesis untuk mengurutkan dan merangkai fakta-fakta yang diperoleh serta mencari hubungan sebab-akibat. Dari hasil interpretasi dan sintesis ini akhirnya disajikan menjadi suatu karya sejarah yang diharapkan dapat bersifat objektif.

4. *Historiografi atau Penulisan Sejarah,*

Proses mensintesakan fakta atau proses menceritakan rangkaian fakta dalam suatu bentuk tulisan yang bersifat historis kritis analitis dan bersifat ilmiah berdasarkan fakta yang diperoleh. Historiografi atau penulisan adalah langkah terakhir dari penulisan karya sejarah. Historiografi merupakan kegiatan

¹⁸*Ibid.*, hlm. 100.

¹⁹Kuntowijoyo, *op cit.*, hlm. 98.

²⁰*Ibid.*, hlm. 101.

menyampaikan sintesis dari penelitian yang ditulis secara kronologis melalui tahap-tahap di atas. Setelah melakukan analisis akan dihasilkan sintesis hasil penelitian yang diwujudkan dalam bentuk suatu karya sejarah yang dituangkan dalam bentuk tulisan.²¹

b. Pendekatan Penelitian

Penulisan sejarah merupakan bentuk dan proses pengkisan atas peristiwa-peristiwa manusia yang telah menjadi masa lampau. Dalam penulisan suatu karya sejarah sangat membutuhkan bantuan konsep maupun teori-teori dari ilmu-ilmu sosial lainnya untuk mempertajam serta memperjelas penulisan.²² Permasalahan pada skripsi ini dapat diperjelas dengan menggunakan pendekatan sosial dan ekonomi.

Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang sangat berpengaruh dalam mengkaji penelitian ini. Pendekatan sosiologi akan mengkaji segi-segi sosial sebuah peristiwa, misalnya golongan sosial mana yang berperan, nilai-nilainya, hubungan dengan golongan lain, konflik berdasarkan kepentingan, ideologi, dan lain sebagainya.²³ Pendekatan sosial yang dipakai dalam penelitian ini cenderung pada peranan tokoh sejarah dalam proses sejarah. Perubahan sosial yang terjadi dengan adanya perkembangan sekolah bagi wanita-wanita pribumi.

Pendekatan politik menurut Deliar Noer adalah aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksud mempengaruhi

²¹Helius Syamsudin, *op.cit.*, hlm.101.

²² Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 3.

²³*Ibid.*, hlm. 4.

dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.²⁴

Pendekatan ekonomi adalah penjabaran dari konsep-konsep ekonomi sebagai pola distribusi, alokasi produksi dan konsumsi yang berhubungan dengan sistem sosial dan stratifikasi sosial yang dapat mengungkapkan peristiwa atau fakta dalam kehidupan ekonomi.²⁵

Pendekatan budaya dipakai oleh penulis untuk mengetahui nilai-nilai kepercayaan yang berkembang di masyarakat pada waktu itu. Penulisan sejarah bukan sekadar mengungkap peristiwa-peristiwa di masa lampau, tetapi merupakan sebuah proses memahami secara utuh pola interaksi manusia dengan segenap potensi yang dimilikinya dalam ruang dan waktu tertentu.

1.9. Data Diri Peneliti

A. Ketua

- a. Nama : Prof. Dr. Husain Haikal
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan : Pembina/ IV d
- d. Jabatan Fungsional : Guru Besar
- e. Jabatan Struktural : -
- f. Fakultas/Jurusan : FISE/Pendidikan Sejarah

²⁴Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik I*, (Medan: Dwipa, 1995), hlm. 6.

²⁵Sidi Gazalba, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1996), hlm. 33.

- g. Perguruan Tinggi : UNY Yogyakarta
- h. Bidang Keahlian : Sejarah Indonesia
- i. Waktu Untuk Penelitian : 15 jam/minggu

B. Anggota I

- a. Nama : Drs. Djumarwan
- b. NIP : 131862252
- c. Pangkat/Golongan : Pembina/ IV a
- d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- e. Jabatan Struktural : -
- f. Fakultas/Jurusan : FISE/Pendidikan Sejarah
- g. Perguruan Tinggi : UNY Yogyakarta
- h. Bidang Keahlian : Sejarah Eropa
- i. Waktu Untuk Penelitian : 15 jam/minggu

C. Anggota II

- a. Nama : Ita Mutiara Dewi, M.Si.
- b. NIP : 19810321200312200
- c. Pangkat/Golongan : Penata / III c
- d. Jabatan : Lektor
- e. Jabatan Struktural : -
- f. Fakultas/Jurusan : FISE/Pendidikan Sejarah
- g. Perguruan Tinggi : UNY Yogyakarta
- h. Bidang Keahlian : Sej. Politik dan Hubungan Internasional
- i. Waktu Untuk Penelitian : 15 jam/minggu

D. Anggota III

- a. Nama : Desyari Widi Astuti
- b. NIM : 07407141008
- c. Judul Proposal Skripsi : Pengaruh Studiefonds terhadap Perkembangan Sekolah Van Deventer Di Mangkunegaran Tahun 1927-1942

E. Anggota IV

- a. Nama : Hermawan Dwi S
- b. NIM :
- c. Judul Proposal Skripsi : Peranan Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Perkembangan Kota Yogyakarta 1950-1960

1.10. Langkah Dan Jadwal Kegiatan

Jenis Kegiatan	Tahun 2012		
	Oktober 1234	November 1234	Desember 1234
1. Persiapan Penelitian	xx		
2. Koordinasi Persiapan		xx	
3. Pelaksanaan Penelitian			Xx
4. Monitoring, Evaluasi, dan penyempurnaan			Xx
5. Penyusunan Draft Laporan Penelitian			Xxx
6. Penyusunan Akhir dan Seminar Hasil Penelitian			X
7. Penyempurnaan dan Pengiriman			X

Laporan ke Dirjen Dikti			
----------------------------	--	--	--

1.11. PERKIRAAN BIAYA PENELITIAN

No	Kegiatan	Jumlah
A.	1. Persiapan administrasi Koordinasi ketua, anggota dan pembantu peneliti untuk membahas pelaksanaan penelitian.	750.000,-
	2. Persiapan Penelitian	
	a. Penyusunan instrumen untuk identifikasi masalah	110.000,-
	b. Mengidentifikasi masalah berdasarkan teknik yang disepakati	520.000,-
	c. Observasi awal	380.000,-
	d. Menyusun alat monitoring dan evaluasi	125.000,-
	e. ATK selama persiapan	385.000,-
	Jumlah	2.270.000,-
B.	Pelaksanaan Penelitian	
	a. Melaksanakan observasi dan pengambilan data	2.560.000,-
	b. Memonitor hasil observasi dan data	1.080.000,-
	c. Mengadakan analisis/pembahasan hasil monitoring	720.000,-
	d. Evaluasi dan refleksi	680.000,-
	e. ATK selama penelitian	650.000,-
	f. Foto copy selama pelaksanaan penelitian	250.000,-
	Jumlah	5.900.000,-
C.	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian	
	a. Menyusun draft laporan penelitian	150.000,-
	b. Menyusun laporan akhir	240.000,-
	c. Menyusun artikel untuk seminar penelitian	60.000,-
	d. ATK selama penyusunan laporan	480.000,-

	Jumlah	930.000,-
D.	Penggandaan & Pengiriman Laporan Hasil Penelitian	
	a. Peggandaan laporan penelitian	750.000,-
	b. Pengiriman laporan penelitian akhir dan artikel ke Dirjen Dikti	150.000,-
	Jumlah	900.000,-
	TOTAL	10.000.000,-

Terbilang: Sepuluh Juta Rupiah

BAB II

PENDIDIKAN DI VORSTENLANDEN

2.1. Vorstenlanden

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, daerah jajahan yang kemudian menjadi Republik Indonesia terbagi menjadi beberapa wilayah. Wilayah tersebut adalah *Weltevreden, Borneo, Sumatra, Celebes, Maluku, Worstenlanden, Province Dost lava, Province Tiddenjava, dan Province Westjava*²⁶

Vorstenlanden adalah daerah kekuasaan raja yang meliputi wilayah *Gubernemen Jogjakarta dan Gubernemen Soerakarta*. Wilayah-wilayah tersebut dipimpin oleh seorang gubernur. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan atau Kepala Wilayah sebagai utusan dari Pemerintah Gubernur Jenderal untuk

²⁶*Biiblad op Het Staatblad van Nederlandsch-Indie, Cet. LXXII, Batavia, Landsdrukkeij, 1936, hlm. 41 3.*

menjalankan tugasnya di daerah. Oleh karena itu, segala kegiatan yang berkaitan dengan wilayah harus sepengetahuan gubernur. Di wilayah *vorstenlanden* ini terdapat 2 (dua) pemerintahan, yaitu *Gewestelijk Bestuur* dan *Zelfbestuur*. *Gewestelijk Bestuur* adalah pemerintahan wilayah di bawah gubernur atau lebih dikenal sebagai *Gubernemen* yaitu *Gubernemen* Jogjakarta dan Soerakarta. Sementara itu, *Zelfbestuur* adalah Pemerintah Swapraja atau Otonom: untuk *Gubernemen* Jogjakarta lebih dikenal sebagai Pemerintah *Swapraja Kasultanan* dan Pemerintah *Swapraja Pakoealaman*, sedangkan untuk *Gubernemen* Soerakarta yaitu Pemerintah *Swapraja Kasunanan* dan Pemerintah *Swapraja Mangkoenagaran*.²⁷

Istilah *Vorstenlanden* pada awalnya mencakup pengertian sebagai wilayah pemerintahan sendiri (*zelfbesturende landschappen*) bagi wilayah kerajaan-kerajaan lokal pribumi (*inlandsche rijken*) yang ada di bawah pengaruh kekuasaan Kumpeni Belanda. Sejak Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda menggantikan pemerintahan VOC, istilah *Vorstenlanden* memiliki pengertian yang lebih spesifik yaitu nama wilayah pemerintahan kerajaan Jawa, atau dalam perspektif Jawa disebut wilayah pemerintahan *Kerajaan Kejawen* atau *Praja Kejawen*, yang mencakup wilayah Kesunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Mangkunegaran dan Kadipaten Pakualaman.²⁸

²⁷ Arsip tentang Officieele Toelichting op de Regelen Aangande de Rechten, Bevoegdheden en Verplichting van Het Land Eenerzijds en van Het Nkoe Alamzche Zelfbestuur Anderzijds.

²⁸ Djoko Suryo, Dari Vorstenlanden ke DIY: Kesenambungan dan Perubahan, Konferensi Nasional Sejarah IX, Jakarta, 5-7 Juli 2011, hal. 3

Adapun wilayah Vorstenlanden sejak 1830 dapat diamati pada gambar 1. Pada abad ke-20 sampai sekitar tahun 1945, penduduk Kasunanan Surakarta berjumlah sekitar 1.704.201 jiwa, Kesultanan Yogyakarta 1.399.351 jiwa, Pakualaman dengan 112.005 penduduk, Mangkunegaran dengan 908.318 penduduk.²⁹

Gambar 1. Wilayah Vorstenlanden



Sumber: Robert Cribb, *Digital Atlas of Indonesian History* (2010), Nias Press

²⁹Bron: De Katholieke Encyclopædie van 1937 dalam Vorstenlanden, Wikipedia, diakses dari <http://nl.wikipedia.org/wiki/Vorstenlanden>

Secara singkat terbentuknya keempat wilayah pemerintahan Vorstenlanden (Praja Kejawen) sebagai berikut:

Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Arya Mangkubumi atau Raden Mas Sujana pada tahun 1755, naik takhta setelah lama berjuang melawan Kumpeni Belanda atau VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*) dan kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwana I (HB I). Ia merupakan putra Sunan Amangkurat IV yang memerintah Kerajaan Mataram di Surakarta (1719-1726), dan adik Sunan Paku Buwana II yang memerintah Kraton Surakarta (1726-1749). Ia mengangkat senjata melawan Kumpeni Belanda yang dianggap telah menjadikan Kraton Surakarta menjadi bonekanya, dan kraton Mataram telah banyak kehilangan wilayah dan kekuasaannya, sebagai akibat semakin besarnya campur tangan Kumpeni Belanda terhadap kraton Jawa. Perjuangan ini diakhiri dengan Perjanjian Giyanti (*Palihan Negari*) pada 13 Februari 1755, antara Pangeran Mangkubumi, Sunan Paku Buwana III dan VOC yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Perjanjian perdamaian di desa Giyanti yang terletak di kaki G. Lawu itu telah menghasilkan penetapan pembagian kerajaan Jawa menjadi dua secara abadi. Perjanjian ini sekaligus menjadi tonggak kelahiran Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar *Ngersa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati ing Ngalaga, Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah.*

Dari perjanjian Giyanti tersebut Kraton Yogyakarta memperoleh bagian wilayah yang mencakup wilayah *Negara Agung*, yaitu Mataram, Kedu, dan Bagelen, dan wilayah *Mancanegara*, yang terletak pada wilayah bagian timur kerajaan meliputi daerah Madiun (kota Madiun, Magetan, Caruban, sebagian Pacitan); Kediri (Kertasana, Kalangbret, Ngrawa/Tulung Agung); Surabaya (Japen/Majakerta; Rembang (Jipang, Teras Karas); Semarang (Sela, Kuwu, sebagian Grobogan). Selain itu, Kesultanan Yogyakarta juga memperoleh separoh dari wilayah Pantai Utara Jawa/Pasisir yang disewakan kepada VOC. Selain itu, Kraton Yogyakarta memperoleh 53.100 *cacah* (karya, rumah tangga) untuk daerah pusat (*Negara Agung*), dan 33.950 *cacah* untuk daerah *Mancanegara*.

Kraton Surakarta, memperoleh wilayah *Negara Agung* Surakarta yang meliputi Surakarta, Pajang, Matesih, dan wilayah *Mancanegara*, umumnya terletak di wilayah bagian barat (Banyumas), dengan 53.100 cacah untuk wilayah Negara Agung dan 32.350 *cacah* untuk wilayah *Mancanegara*.

Peristiwa pembagian wilayah kerajaan terus berlanjut di wilayah *Vorstenlanden* ketika Perjanjian Salatiga pada tahun 1757 dilakukan antara Raden Mas Said, Paku Buwana III, dan VOC. Perjanjian ini dilaksanakan untuk mengakhiri perlawanan yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengku Buwana I. Perjanjian ini menyebabkan Kraton Surakarta harus menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Raden Mas Said (cucu Sunan Amangkurat IV, kemenakan PB II dan Pangeran Mangkubumi) untuk menjadi wilayah pemerintahan Kadipaten, di bawah kekuasaannya. Ia

bergelar K.P.A. Mangkunegara I dan wilayah pemerintahannya disebut Kadipaten Mangkunegaran.

Pemisahan wilayah kraton juga dialami oleh kraton Yogyakarta. Atas jasa Pangeran Natakusuma (putra HB I, adik HB II) terhadap pemerintah Inggris di bawah Raffles (1811-1816), ia mendapat kedudukan sebagai “*Pangeran Merdika*” dengan memperoleh sebagian wilayah kraton Yogyakarta yang dijadikan wilayah pemerintahan Kadipaten. Ia bergelar K.P.A. Paku Alam I (1813-1829) dan wilayah pemerintahannya disebut Kadipaten Pakualaman. Peristiwa ini terjadi setelah pada 20 Juni 1812 pasukan Inggris menyerbu dan menjarah Kraton Yogyakarta, dan menurunkan Sultan HB II, yang termasuk seorang tokoh Sultan yang bersikap anti-Barat dan pembela budaya Jawa, serta menggantikannya dengan Sultan HB III (putra HB II).³⁰

Perjalanan kerajaan Jawa Surakarta dan Yogyakarta pada akhir abad ke-18 banyak menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, sekalipun demikian masih dapat dipandang cukup memiliki kemandirian dalam menghadapi tekanan pengaruh kekuasaan Barat. Masa itu dapat dipandang sebagai sebuah bentuk perubahan dinamis dari kerajaan Jawa dalam menghadapi tantangan eksternal dan internalnya. Selama Periode 1755-1800 kerajaan Jawa mengalami kemakmuran ekonomi dan situasi politik yang stabil, tentram dan damai, termasuk Kesultanan Yogyakarta yang lahir pada masa itu. Penduduk Jawa tumbuh cepat di tengah-

³⁰ Ricklefs, *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi...*, hal. 350-351. Lihat pula M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. Third Eds. (Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave, 2001), hal. 14. Periksa pula P.B.R. Carey, “The Spoy Conspiracy of 1815 in Java”, *BKI*, jilid 133 (1977), hal. 296

tengah produksi pangan yang meningkat, bebas dari gangguan hama dan epidemi. Pada sisi lain, masa itu juga merupakan era baru dalam sejarah Jawa, yaitu era Kesultanan Yogyakarta. Naik takhtanya Sultan Hamengku Buwana I pada 1755, menjadi ciri lahirnya era Kesultanan Yogyakarta, yang memiliki ciri, identitas dan peran unik sebagai pusat pemerintahan kerajaan dan kebudayaan Jawa, yang pada masa kemudian mampu berkembang menjadi salah satu pusat kebudayaan Indonesia modern yang berlangsung hingga pada masa kini.

Berakhirnya Perang Diponegoro menjadi tonggak perubahan bagi sejarah Jawa dan perubahan penting bagi peta kehidupan *Praja Kejawen (Vorstenlanden)* yang baru (1830-1942) dari Praja Kejawen lama (1755-1830). Salah satu ciri *Praja Kejawen* baru pada masa itu pada hakekatnya terletak pada kedudukannya yang sangat khusus dalam hubungannya dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Berbeda dengan daerah Gubernemen (daerah yang dikuasai dan diperintah secara langsung oleh pemerintah Belanda di Batavia), Penguasa Praja Kejawen masih memegang kekuasaan dan otoritas pemerintahannya terhadap rakyat atau kawulanya di wilayah kerajaannya sesuai dengan landasan pandangan dunia, konsep, tatanan, sistem pemerintahan dan birokrasi yang berlaku dalam kebudayaan kraton Jawa. Hubungan pemerintah Belanda-Raja Praja Kejawen pada dasarnya lebih terbatas pada dasarnya lebih terbatas pada masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan perundangan (*wetgeving*), urusan keamanan (*politie*), pengadilan (*justitie*), dan kepangreh-prajaan (*bestuursvoering*).³¹

³¹ C. Ch. Van den Haspel, *Overzicht in Overleg. Hervorming van Justitie, Grondgebruik en Bestur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930* (Dordrecht-

Di luar segi-segi tersebut Sultan dan Sunan masih memiliki kebebasan untuk melangsungkan otoritas pemerintahan dan kekuasaannya. Dengan demikian hubungan raja dan rakyatnya masih terjaga sesuai dengan tradisi yang berlaku, dan berlangsung hingga masa berakhirnya masa penjajahan Belanda

2.2. Perubahan Pendidikan Di Vorstenlanden

Belanda menyebabkan perubahan pendidikan di Indonesia dengan mengenalkan suatu jenis pendidikan baru yang dalam banyak hal berbeda dari lembaga-lembaga pribumi. Perbedaan-perbedaan yang pokok adalah: (1) pendidikan yang dibiayai oleh sekolah-sekolah umum netral terhadap agama; (2) tidak terlalu memikirkan bagaimana caranya hidup secara harmonis dalam dunia, tetapi terutama menekankan tentang bagaimana memperoleh kehidupan; (3) diselenggarakan berdasarkan perbedaan kelompok etnis di dalam masyarakat; (4) juga diselenggarakan untuk mempertahankan perbedaan kelas dalam masyarakat Indonesia terutama di kalangan orang Jawa; (5) sebagian besar diarahkan kepada pembentukan kelompok elit masyarakat yang bisa dipergunakan untuk mempertahankan supremasi politik dan ekonomi Belanda di negeri jajahannya dan dengan demikian benar-benar mencerminkan kebijakan pemerintah Hindia Belanda.

Sekolah-sekolah pertama yang didirikan Belanda di masa VOC pada permulaan abad kedelapan belas bersifat keagamaan disamping kegiatan dagang mereka. Baru setelah VOC dibubarkan dan kekuasaan diambil alih oleh

pemerintah Hindia Belanda, diadakan kebijakan pemisahan agama dari pendidikan.³² Netralitas dalam hal agama tidaklah berarti bahwa pemerintah kolonial tidak berminat pada sekolah-sekolah yang memberikan pelajaran agama. Pemerintah kolonial juga memberikan bantuan keuangan dan materiil kepada sekolah-sekolah swasta Protestan dan Katholik dan sampai batas tertentu juga kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam yang memberikan pelajaran sekuler.³³

Pada sekitar awal abad ke-20 pemerintah kolonial Belanda sangat ingin menghentikan keterlibatannya di dalam ekonomi lokal. Namun, pemerintah secara perlahan-lahan memberikan hak istimewa pada dirinya sendiri yang berlawanan dengan praktik-praktik yang biasanya dihubungkan dengan kebijakan *laissez-faire*. Pada awal abad ke-20, terjadi "kecenderungan kolonial baru" yang diekspresikan dalam Politik Etis, yang bertujuan meningkatkan standar kesejahteraan masyarakat pribumi.³⁴

Kecenderungan kolonial baru itu berkaitan dengan perubahan kondisi objektif yang terjadi di wilayah jajahan. Pax-Neerlandica telah dicapai, eksploitasi tanah jajahan kurang dijadikan alasan utama kekuasaan Belanda, dan munculnya keprihatinan atas kesejahteraan penduduk pribumi. Munculnya kebijakan baru yang disebut politik Etis ini melahirkan perubahan-perubahan yang mendasar di lingkungan penjajahan selama awal abad ke-20. Sebenarnya, dalam kebijakan politik Etis lebih pada janji daripada pelaksanaan, dan fakta-fakta penting tentang

³² J.S Furnivall, *Colonial Policy and Practice*, Cambridge: Cambridge: University Press, 1948, hal. 372 dalam Solo Soemarjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gama Press, 1991, hal. 278

³³ Soemarjan, *op.cit.* hal. 278

³⁴ Thomas J. Lindblad. 2000. *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: berbagai tantangan baru*. Jakarta: LP3ES, hal. 231

eksploitasi dan penaklukan sesungguhnya tidak berubah. Politik Etis berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi³⁵

Pada tahun 1899, C. Th. Van Deventer, seorang ahli hukum yang pernah tinggal di Indonesia selama 1880-97, menerbitkan sebuah artikel berjudul "Een eereschuld" (suatu hutang kehormatan), di dalam jurnal Belanda *De Gids*. Dia menyatakan bahwa negeri Belanda berhutang kepada penduduk pribumi semua kekayaan yang telah diperas dari mereka. Hutang ini harus dibayarkan kembali dengan cara memberi prioritas utama kepada kepentingan rakyat di dalam kebijakan kolonial. Sampai saat meninggalnya pada 1915, van Deventer adalah salah satu kampion politik Etis yang terkemuka, sebagai penasihat pemerintah dan anggota parlemen.

Pada 1901 Ratu Wilhelmina mengumumkan suatu penyelidikan tentang kesejahteraan di Jawa dan dengan demikian politik Etis secara resmi disahkan. Pada 1902 W.F Idenburg menjadi Menteri Urusan Jajahan (1902-05, 1908-09, 1918-9) dan juga menjadi Gubernur Jenderal (1909-1916); dia mempraktikkan pemikiran politik Etis lebih daripada siapapun. Belanda menyebutkan tiga prinsip yang dianggap merupakan dasar kebijakan baru itu: pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk. Untuk pelaksanaannya diperlukan dana. Maka, hutang pemerintah kolonial yang mencapai sekitar 40 juta gulden diambil alih oleh pemerintah Belanda, sehingga Batavia dapat meningkatkan pengeluaran tanpa harus dibebani hutang. Politik Etis berjalan di tengah-tengah lingkungan ekonomi yang sedang berubah dengan cepat. Proyek-proyek yang menyangkut

³⁵Ricklefs, M.C., 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi, hal. 319

kesejahteraan rakyat segera digalakkan, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pengairan, perpindahan penduduk, pelayanan kesehatan, penggabungan desa agar efisien, perluasan pendidikan, lembaga perkreditan, dan lain-lain.

Adapun beberapa ciri umum politik pendidikan Belanda yakni:³⁶

1. *Gradualisme* yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia

Pendidikan berjalan lamban karena (1) jumlah biaya yang dikeluarkan pemerintah Belanda hanya 5-10% dari biaya pendidikan di Filipina; (2) urusan penduduk selama ini diserahkan kepada raja masing-masing oleh I orang sebab katanya Belanda tidak ingin mengganggu adat istiadat setempat dan raja-raja setempat tidak berbuat banyak di bidang pendidikan; (3) membatasi kesempatan belajar bagi orang Indonesia antara lain menjaga anak Belanda selalu lebih maju.

2. *Dualisme* dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan pribumi. Dualisme dapat dilihat sebagai konsekuensi kenyataan berbagai bangsa yang hidup bersama dalam hubungan kolonial dengan hak yang berbeda-beda, Belanda sebagai penjajah, penguasa dan pemberi pekerjaan dan orang Indonesia sebagai yang terjajah, buruh dan pekerja.

3. Kontrol sentral yang kuat

Pendidikan dikontrol secara terpusat, guru-guru dan orang tua tidak mempunyai pengaruh langsung dalam politik pendidikan. Berbagai hal

³⁶ S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, hal. 20 - 32

berkaitan dengan sekolah, kurikulum, buku pelajaran, persyaratan guru, jumlah sekolah, jenis sekolah, pengangkatan guru ditentukan oleh pemerintah pusat

4. Keterbatasan tujuan sekolah pribumi dan peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai faktor penting dalam perkembangan pendidikan

Sekolah pertama untuk anak Indonesia didirikan oleh Pemerintah dengan tujuan mendidik anak-anak aristokrasi Jawa sebagai pegawai perkebunan. Pada tahun 1864 ditetapkan Klein Ambtenaars' Examen, ujian pegawai rendah yang harus ditempuh agar seseorang dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah. Sekolah khusus seperti untuk anak-anak raja yang semula dimaksud untuk memberi pendidikan umum, kemudian di reorganisasi pada tahun 1900 menjadi OSVIA atau sekolah pegawai pribumi. Perluasan pendidikan ditentukan oleh kebutuhan pegawai dan juru tulis yang meningkat.

5. Prinsip konkordansi yang menyebabkan sekolah di Indonesia sama dengan di Belanda

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan perpindahan murid-murid dari Hindia Belanda ke sekolah-sekolah di negeri Belanda

6. Tidak ada perencanaan yang sistematis untuk pendidikan anak pribumi.

Sekitar 1910 terdapat berbagai ragam sekolah rendah bagi anak-anak Indonesia, sekolah pendidikan pegawai dan dokter di Jawa. Ciri khas dari sekolah-sekolah ini ialah masing-masing berdiri sendiri tanpa hubungan

organisasi antara yang satu dengan yang lain dan tanpa jalan untuk melanjutkannya.

Politik etis telah membuka jalan bagi penduduk pribumi untuk mengenyam pendidikan barat secara lebih leluasa. Meski demikian, ada dua aliran pemikiran yang berbeda mengenai jenis pendidikan yang bagaimana dan untuk siapa. Pertama, Snouck Hurgronje dan direktur pendidikan 'Etis' yang pertama (1900-5), J.H. Abendanon, mendukung pendekatan yang bersifat elitis. Mereka menginginkan pendidikan yang lebih bergaya Eropa dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar bagi kaum elit Indonesia yang dipengaruhi Barat, yang dapat mengambil alih banyak dari pekerjaan yang ditangani para pemerintah berkebangsaan Belanda. Dengan demikian akan tercipta elit yang tahu berterima kasih dan bersedia bekerjasama, memperkecil anggaran pemerintah, mengendalikan 'fanatisme' Islam, dan akhirnya menciptakan suatu keteladanan yang akan menjiwai masyarakat Indonesia golongan bawah. Kedua, Idenburg dan GG van Heutz (1904-9) mendukung pendidikan yang lebih mendasar dan praktis dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya bagi golongan bawah. Pendekatan etis diharapkan menghasilkan pimpinan bagi zaman pencerahan baru Belanda-Indonesia, sedangkan pendekatan yang merakyat diharapkan memberikan sumbangan secara langsung bagi kesejahteraan. Namun, tak satupun kebijakan dijalankan dengan dukungan dana memadai, dan tak satupun menghasilkan apa yang diinginkan oleh masing-masing pendukungnya.³⁷

³⁷Ricklefs, *op.cit.*, hal. 329-330

Di bawah pengaruh kelompok pertama muncullah beberapa jenis sekolah, misalnya pada 1900 dibuka sekolah pelatihan untuk para pejabat pribumi (*Opleidingscholen voor Inlandsche Ambtenaren*, OSVIA), yang merupakan modifikasi dari "hoofdscholen" (sekolah para kepala) yang ada sebelumnya. Bahasa pengantar Bahasa Belanda, dan lama studi lima tahun. Lalu pada 1902 sekolah "Dokter-Jawa" diganti menjadi STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen, sekolah untuk pelatihan dokter-dokter pribumi), juga berbahasa Belanda. Sekolah jenis ini, meski terbuka untuk pribumi, tetapi hanya orang-orang kayalah yang dapat memasukinya. Usaha Abendanon ini secara umum berhasil, kecuali ketika ia ingin memperluas kesempatan pendidikan bagi kaum wanita Jawa kalangan atas, karena mendapat tantangan dari bangsawan yang konservatif. Kaum konservatif berpandangan bahwa gagasan mengenai pendidikan kaum wanita sama sekali tidak dapat diterima. Demikian pula, cita-cita tentang pendidikan kaum wanita yang didambakan Kartini dan Abendanon tidak pernah mendapatkan prioritas pemerintah. Pada 1911, Abendanon memberikan penghargaan pribadi kepada Kartini dengan menerbitkan surat-surat Kartini yang ditulis selama 1899-1904 kepada isteri Abendanon dengan judul *Door duisternis tot licht*. Di negeri Belanda pada 1913 berdiri Kartini Fonds, untuk mengurus pendidikan berbahasa Belanda bagi kaum wanita Jawa. Yayasan ini kemudian mendirikan sekolah-sekolah Kartini yang di kemudian hari memainkan peranan penting dalam gerakan emansipasi wanita Jawa.

Selama van Heutsz menjabat sebagai Gubernur Jenderal (1904-9) dan Dirk Fock menjabat Menteri Urusan Jajahan (1905-8), gagasan mengenai pendidikan

rakyat memperoleh lebih banyak dukungan. Fock mengutamakan sekolah-sekolah teknik dan kejuruan yang tujuannya untuk membangkitkan kegiatan ekonomi rakyat (kerajinan rakyat). Sekolah-sekolah desa (desasholen atau volkssholen, sekolah rakyat) mulai dibuka dan diperluas, namun biayanya dibebankan kepada rakyat sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah. Politik etis menetapkan apa yang baik untuk rakyat, dan sesudah itu memberitahukan berapa yang harus mereka bayar demi perbaikan itu. Pada 1912 telah berdiri 2500 sekolah rakyat dan pada 1930 sebanyak 9600 sekolah. Lebih dari 40% anak-anak pribumi usia 6-9 tahun memasuki sekolah rakyat dan kebanyakan dengan rasa terpaksa.

Pada tahun 1900, orang pribumi yang masuk sekolah pemerintah dan swasta sekitar 265.940 orang, pada 1930/1 mencapai 1,7 juta orang. Namun jumlah ini belum seberapa dibandingkan dengan besarnya jumlah penduduk. Pada 1930 sekitar 1,66 juta pribumi duduk di sekolah dasar yang menggunakan bahasa daerah atau sekitar 2,8% dari total penduduk. Sementara itu, orang Indonesia yang sekolah di sekolah-sekolah Eropa (HIS, MULO, AMS, dan sekolah kejuruan) sebanyak 84.609 atau 0,14%. Di tingkat perguruan tinggi hanya terdapat 178 orang pribumi atau 0,0003% (3 per satu juta) dari jumlah penduduk³⁸.

Pendidikan ala Barat tidak menghasilkan elit baru yang tahu berterima kasih dan bersedia bekerja sama, tidak pula melahirkan semangat baru yang berkobar-kobar di kalangan rakyat. Langkah-langkah kesejahteraan umumnya tidak menghasilkan kesejahteraan. Pendidikan menghasilkan beberapa pegawai

³⁸*Ibid*, hal. 335 - 336

yang cakap dan setia, tetapi juga menghasilkan kaum elit yang tidak puas yang memimpin gerakan-gerakan anti-penjajahan.

2.3.PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI VORSTENLANDEN

Di Vorstenlanden terdapat bermacam-macam sekolah model Barat. Menurut data yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan di wilayah Surakarta tahun 1930, secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Sekolah-sekolah negeri berbahasa daerah
- b. Sekolah-sekolah *neutral* berbahasa Belanda
- c. Sekolah-sekolah yang dikelola oleh *Zending*
- d. Sekolah-sekolah yang dikelola oleh *Missi*
- e. Sekolah-sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah
- f. Sekolah-sekolah yang dikelola oleh Budi Utomo
- g. Sekolah-sekolah yang dikelola oleh pihak kerajaan³⁹

Begitu pula di wilayah Yogyakarta yang justru merupakan tempat cikal bakal munculnya beberapa sekolah di Indonesia seperti Taman Siswa dan Sekolah Muhammadiyah.

a. Sekolah-Sekolah Negeri Berbahasa Daerah

Jumlah Sekolah-sekolah Negeri Berbahasa Daerah di Surakarta sampai tahun 1930 sekitar 22 buah. Terdiri dari 13 *Sekolah Angka Dua (De Scholen der Tweede Klasse)*, dua sekolah *Meisesschool* (Sekolah Putri) dan tujuh sekolah-sekolah persiapan pendidikan guru bagi Sekolah Desa (*OnderbouwHolland Inlander*

³⁹*Opgave Van Openbare Onderwijsrichtingen in Het Gewest Soerakarta.* (Surakarta : Arsip Mangkunegaran, 1931)

Kweekschool). Sekolah-sekolah tersebut terdapat di daerah Pasar Kliwon, Laweyan, Serengan, Jebres, Kota Mangkunegaran dan Colomadu.⁴⁰

b. Sekolah – sekolah Netral Berbahasa Belanda

Sekolah-sekolah Netral Berbahasa Belanda khusus diperuntukkan bagi anak-anak Eropa. Sekolah-sekolah jenis ini mempunyai fasilitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah untuk anak-anak pribumi. Mutu pendidikannya sangat luas, selain memberikan mata pelajaran yang lebih lengkap juga didukung oleh berbagai macam fasilitas yang memadai sebagai penunjang bagi kelancaran proses belajar mengajar. Guru-guru yang mengajar kebanyakan adalah guru-guru yang berkebangsaan Eropa yang betul-betul mempunyai ijazah Diploma Guru.

Bahasa Belanda merupakan syarat utama dalam penerimaan siswa di sekolah ini, sehingga tidak semua orang dapat memasukkan anaknya ke sekolah ini. Untuk memasuki sekolah ini dibutuhkan biaya yang besar, sehingga hanya orang-orang kaya saja yang mampu menyekolahkan anaknya pada sekolah ini. lingkungan sekolah yang elit menyebabkan sekolah ini terpisah dari sekolah rakyat kebanyakan, siswa dari sekolah lain yang tidak sederajat tidak akan berani masuk dalam lingkungan sekolah ini. Kondisi semacam inilah yang semakin memperlebar kesenjangan sosial. Di satu pihak, siswa sekolah ini berkembang menjadi elite yang berbudaya Barat, tetapi terasing dalam lingkungannya sendiri. Di lain pihak, siswa dari sekolah lain yang merupakan masyarakat kebanyakan tetap tidak dapat memperoleh kemajuan yang berarti.

⁴⁰*Ibid*

Jumlah sekolah ini di Surakarta hanya ada tiga buah, yaitu *HIS JongenSchool* di Mangkunegaran, *HIS Meisesschool* di Slompretan, dan *Schakelschool* di Mangkunegaran.⁴¹ Namun dengan jumlah sekolah yang hanya tiga buah tersebut telah mencukupi kebutuhan pendidikan kalangan Eropa. Bahkan presentase pemenuhan kebutuhan sekolah untuk kalangan Eropa atau yang dianggap sejajar lebih besar dibanding dengan presentase murid pribumi yang dapat bersekolah.

c. Sekolah-sekolah yang dikelola oleh *Zending*

Salah satu motif kedatangan bangsa Belanda di Hindia Belanda adalah motif theokratis, yaitu penyebaran Injil. Awalnya sasaran penyebarannya dilakukan secara langsung melalui gereja, penerbitan buku-buku Kristen dan lain-lain. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan usaha tersebut berkembang dengan pendirian-pendirian rumah sakit dan sarana pendidikan.

Pada awalnya pendirian rumah sakit dan sekolah Kristen di Surakarta mendapat tentangan dari Sunan dan Van Wijk yang saat itu menjabat sebagai Residen Surakarta. Akhirnya sekolah Kristen di Surakarta untuk pertama kali diperkenalkan dan dibuka oleh Perkumpulan *Zending van de Gereformeerde Kerk te Delf*, yang terdiri dari C. Van Proosdij, Van Ansel, C.J. De Zomer, G.C.E. de Man serta Pendeta Bekker.

Sekolah ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu, sekolah yang dibuka khusus untuk anak-anak Eropa atau yang sederajat serta sekolah Kristen untuk anak Bumiputera. Dalam kurikulumnya, selain memperkenalkan ajaran-ajaran Kristen juga memperkenalkan kebudayaan Barat, seperti cara berpakaian, cara makan,

⁴¹*Ibid*

belajar dan yang lainnya. Bahasa Belanda menjadi kurikulum pelajaran yang penting, bahasa ini juga digunakan sebagai bahasa pergaulan. Untuk mendukung program di atas maka siswa maupun guru-guru yang mengajar diharuskan tinggal di asrama yang telah disediakan dan sehari-harinya diwajibkan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Aturan-aturan ini menyebabkan orang-orang yang dididik di tempat tersebut terpisah dari budaya Jawa, lebih-lebih *Zending* juga mampu menampung para alumni sekolahnya. Mereka disediakan lapangan pekerjaan dibidang kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan yang lain. Tujuan pendirian sekolah ini sejalan dengan tujuan pemerintah kolonial yaitu menyebarkan ajaran agama Kristen, untuk itu sekolah ini banyak memperoleh bantuan dan kemudahan dari pemerintah kolonial. Dalam waktu singkat sekolah-sekolah ini dapat berkembang dengan pesat, di Surakarta sendiri sekolah ini pada tahun 1930 berjumlah 20 buah yang tersebar di daerah Margoyudan, Villapark (dekat Pasar Legi), Sidokare, Jebres, Kerten, Gemblegan, Danukusuman, Kawatan, Gilingan dan Manahan⁴²

d. Sekolah-sekolah yang dikelola oleh *Missi*

Gagasan *Missi* (Roma Katholik) untuk mendirikan sekolah muncul dari Pastor Keyser di Semarang pada tahun 1890. Semula gagasan ini kurang mendapat dukungan dari masyarakat Jawa, karena pada saat itu masyarakat Jawa telah memiliki kebudayaan yang tinggi. Di Jawa terdapat sedikitnya dua arus konsepsi asing, yaitu konsepsi Hindu yang telah lama hidup di tengah-tengah masyarakat berdampingan dengan kebudayaan tradisional. Hindu Jawa dan Islam Jawa selalu

⁴²*Ibid.*

menunjukkan ciri tersendiri.⁴³ Karena itu para missionaris dalam menjalankan tugasnya banyak mengalami hambatan.

Sekolah Khatolik berhasil didirikan oleh Pastor Keyser di daerah Yogyakarta dalam Klaten pada tahun 1892, sebelumnya ia mendirikan sekolah di Magelang pada tahun 1890. Semula sekolah tersebut bercorak *Europees* yang netral, yang memberikan kebebasan pada murid-muridnya untuk mengikuti atau tidak pelajaran agama Khatolik. Lama kelamaan ajaran Kotekismus mulai dimasukkan.⁴⁴ bahkan juga diajarkan lewat peraturan-peraturan dalam asrama siswa.

Ajaran-ajaran dari para missionaris meluas hingga ke daerah Surakarta. Tahun 1921 didirikan sekolah Khatolik di tengah-tengah sekolah lain yang lebih dulu didirikan di Surakarta. Perkembangan ini tidak lepas dari perubahan metode pendidikan dan akibat bantuan serta fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Hingga tahun 1930, jumlah sekolah yang dikelola *Missie* di kota Solo berjumlah 17 buah, yang meliputi satu sekolah MULO, satu sekolah ELS dua buah HIS satu buah HIS yang khusus untuk perempuan, 10 buah *standarschool*, satu buah HCS dan dua buah *Meijesvervolkschool*. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di daerah Margoyudan, Manahan, Gajahan, dan Pasar Legi.⁴⁵

e. Sekolah-sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah

Perkembangan sekolah-sekolah *Neutral*, *Zending* dan *Missie* yang pesat, mengakibatkan munculnya reaksi negatif terhadap dominasi kultur Barat dalam

⁴³H. Baudet dan I.J. Brugmans, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1987), hal. 362

⁴⁴Ibid, hal. 364-365

⁴⁵*Opgave Van Openbare Onderwijsrichtingen in Het Gewest Soerakarta. Op.Cit.*

bidang pendidikan pada awal ke XX. Sekolah-sekolah tersebut menyebabkan banyak pemuda pribumi yang lebih memilih pengajaran Barat, karena dianggap sebagai pintu gerbang ke arah penyerapan ilmu pengetahuan dan lembaga-lembaga baru yang diperkenalkan oleh administrasi kolonial. Di Surakarta reaksi terhadap penginjilan dan munculnya sekolah-sekolah Kristen dan Khatolik, paling keras terjadi di daerah Laweyan yaitu daerah yang banyak didiami oleh pedagang Islam.⁴⁶

Seorang yang peduli akan pendidikan dari Yogyakarta, K.H. Ahmad Dahlan, mulai mengusahakan sebuah sekolah yang bernafas Islam. Tujuannya adalah mengajarkan nilai agama Islam dan berusaha menghambat munculnya intelektual yang bersifat materialistis dan egois yang dinilai dihasilkan oleh pendidikan barat.⁴⁷ Sebagai langkah awal, Ahmad Dahlan dan beberapa orang temannya mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah. Dilihat dari tujuannya, pendidikan Islam mendapat perhatian utama dalam organisasi tersebut dan mereka berusaha membentuk orang-orang terpelajar yang berpandangan lain Islam. Gerakan ini mendapat dukungan dari kalangan masyarakat luas serta tokoh agama setempat, sehingga dalam waktu singkat munculnya cabang-cabang Muhammadiyah di daerah-daerah.

Berdasarkan tujuan mulianya, maka Muhammadiyah membentuk majelis pendidikan dan pengajaran pada tahun 1920. Adanya majelis pendidikan tersebut

⁴⁶George D. Larson, *Masa Menjelang Revolusi : Keraton dan Kehidupan Dunia Politik di Surakarta 1912-1942*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1990), hal 52.

⁴⁷Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908-1918. terj.* (Jakarta : Pusat Grafitti Press, 1989), hal. 123.

menyebabkan meluasnya perkembangan sekolah Muhammadiyah di berbagai daerah termasuk Surakarta. Pada tahun 1930 tercatat ada 10 buah sekolah Muhammadiyah di Surakarta yang sebagian besar terdiri atas sekolah *standart school*. Sekolah-sekolah tersebut terletak di Mangkunegaran, Notokusuman, Kleco, Kampung Sewu, Kauman, Serengan dan Pasar Legi.⁴⁸

f. Sekolah-sekolah yang dikelola oleh Budi Utomo

Surakarta yang merupakan daerah *Vorstenlanden* mengalami perubahan yang berarti khususnya dalam bidang pendidikan, terbukti dari banyaknya sekolah-sekolah yang didirikan oleh berbagai macam organisasi. Perubahan juga terjadi pada bidang politik, pada tahun 1914, Sarekat Islam atau SI sebagai organisasi terkuat pada masa sebelumnya mulai digeser kedudukannya oleh Budi Utomo. Dalam waktu singkat Budi Utomo mempunyai anggota yang sebagian besar terdiri dari kaum *priyayi*. Kondisi ini nampaknya merupakan hasil campur tangan pihak keraton dalam organisasi ini.⁴⁹ Bukti dari keterlibatan kraton ini dapat dilihat dengan masuknya R.M. H. Soerjosoeparto (calon Mangkunegaran VII) yang memainkan peran penting khususnya dibidang politik pada tahun pertama berdirinya Budi Utomo Cabang Surakarta. Pada tahun 1916, pangeran Hadiwijaya salah seorang putra Paku Buwono X diangkat menjadi ketua Cabang Surakarta.⁵⁰ Keanggotaan yang dikuasai oleh kaum *priyayi* tersebut mengakibatkan Budi Utomo tidak terlepas dari kepentingan anggotanya. Dalam bidang pendidikan, Budi Utomo cenderung mementingkan pendidikan tingkat tinggi bagi kaum

⁴⁸*Opgave Van Openbare Onderwijsrichtingen in Het Gewest Soerakarta. Op. Cit.*

⁴⁹George D. Larson, *Op Cit*, hal. 86.

⁵⁰*Ibid.*

priyayi dibanding pendidikan tingkat dasar dan menengah bagi kaum pribumi secara menyeluruh. Pengetahuan bahasa Belanda merupakan pelajaran yang istimewa dalam sekolah Budi Utomo. Hal ini sesuai dengan keinginan dari anggotanya, khususnya para *priyayi* yang beranggapan bahwa bahasa Belanda merupakan alat untuk meningkatkan mobilitas sosial mereka.

Di Surakarta, Budi Utomo hanya mendirikan *standard school* di empat desa, yaitu Loemboeng Wetan, Timuran, Colomadu dan Tegalgondo.⁵¹ Pendiannya memperoleh bantuan dari sekolah-sekolah barat yang telah ada. Sekolah-sekolah tersebut tidak pernah menjadi besar, sebab selain kekurangan dana, Budi Utomo tidak cukup progresif dalam menghadapi peraturan-peraturan pemerintah yang membuat batasan-batasan dalam bidang pendidikan.⁵²

g. Sekolah-Sekolah yang Dikelola oleh Kerajaan

Perkembangan pendidikan di kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran tidak terlepas dari adanya pembaharuan-pembaharuan di segala bidang yang terjadi pada awal abad XX. Semua kerajaan di *Vorstenlanden* memerlukan pembaharuan di bidang pendidikan, angkutan umum, komunikasi dan administrasi, sebab dianggap tertinggal dibanding daerah-daerah yang diperintah langsung oleh pemerintah Belanda. Berkat anjuran dari pemerintah kolonial, maka pihak kerajaan kemudian mengadakan perubahan-perubahan dalam bidang tersebut diatas. Khusus dalam bidang pendidikan pemerintah pemerintah memberikan wewenang kepada pihak kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran untuk

⁵¹*Opgave Van Openbare Onderwijsrichtingen in Het Gewest Soerakarta. Op.Cit.*

⁵²Akira Nagazumi, *Op.Cit.*, hal. 135-140.

mengelola sendiri sekolah-sekolah yang akan didirikan. Berikut ini akan menjelaskan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pihak Kasunanan dan mengenai sekolah-sekolah Mangkunegaran akan dijelaskan dalam sub bab berikutnya.

Perkembangan pendidikan di Kasunanan tidak terlepas dari seorang tokoh, yaitu Paku Buwono X. Sejak Paku Buwono X memegang pemerintah di Kasunanan, pendidikan mulai mendapat perhatian besar. Awalnya beliau mengirimkan putra-putrinya serta para *sentono dalem* ke sekolah-sekolah Barat. Kegiatan ini memberikan dorongan kuat kepada para *abdi dalem* untuk ikut serta menuntut ilmu melalui bangku pendidikan.

Perhatian Paku Buwono X terhadap dunia pendidikan diwujudkan dengan mengusahakan sekolah sendiri. Untuk itu pada tanggal 1 November 1910, beliau mendirikan HIS Kasatriyan yang kemudian disusul dengan pendirian *Froberschool* Pamardi Putri (yang kemudian menjadi Pamardi Siwi) pada tanggal 26 Agustus 1926. Terakhir adalah pendirian HIS Pamardi Putri pada tanggal 1 Juli 1927.⁵³ Tujuan pendirian sekolah yang terakhir ini untuk menyediakan tempat belajar bagi putri sekar Kedaton G.R.A Koestiyah, sehingga memudahkan pengawasan serta pengamanan.⁵⁴

Seperti pada sekolah HIS lainnya, HIS Kasatriyan membatasi dalam hal penerimaan murid. Dalam hal ini tidak hanya faktor keuangan yang menjadi pertimbangan, tetapi juga faktor keturunan. Siswa yang diterima di sekolah ini minimal haruslah seorang Raden. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kewibawaan keluarga saja. Kurikulum untuk sekolah HIS Kasatriyan maupun HIS

⁵³*KabarPaprentahan*. (Reksopustoko Mangkunegaran, 1932), hal. 44.

⁵⁴*Narpowandowo*, No. 1. 1929, hal. 63.

Pamardi Putri disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada HIS *Goebernemen*. Tenaga pengajar terdiri dari para guru yang berkebangsaan Eropa serta beberapa orang Bumiputera yang mempunyai ijazah Diploma guru. Jabatan pimpinan sekolah sampai tahun 1933 selalu dipegang oleh orang Belanda. Selanjutnya setelah tahun tersebut jabatan pimpinan sekolah dipegang oleh guru-guru Bumiputera.⁵⁵

Berdasarkan kurikulum yang ada, HIS Kasatriyan dan Pamardi Putri memungkinkan siswa-siswinya untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, seperti MULO. Laporan dari komisi Pamulangan Kraton tanggal 18 Juni 1936, menyebutkan bahwa dari sejumlah murid-murid yang menempuh ujian MULO, dari HIS Pamardi Putri berhasil lulus 100%, sedangkan HIS Kasatriyan berhasil lulus 92,5%.⁵⁶ Keberhasilan tersebut menyebabkan kedua sekolah tersebut mendapat posisi yang baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Selain mengusahakan sekolah model Barat (*Western Lager Onderwijs*) seperti tersebut di atas, di Kasunanan juga terdapat jenis pendidikan formal lainnya yaitu Sekolah Desa (*Volkschool*) diperuntukkan bagi rakyat kebanyakan. Sekolah jenis ini menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar dan lama pendidikannya 3 tahun. Rencana pelajaran di sekolah ini sangat sederhana, yaitu hanya diajarkan membaca, menulis dan berhitung secara sederhana pula. Dengan materi pelajaran tersebut, meskipun ditambah dua tahun dengan sekolah sambungan tetap tidak memungkinkan bagi alumni sekolah ini untuk menduduki jabatan menengah di kepegawaian. Mereka hanya dapat menjadi pegawai rendahan.

⁵⁵*Buku Induk HIS Pamardi Putri*, 1927, dan *Kabar Paprentahan*, 1936, hal. 53.

⁵⁶*Kabar Paprentahan*, 1936, h. 122-123.

Jumlah sekolah ini di Kasunanan pada tahun 1923 masih sangat sedikit. Mulai tahun 1925 jumlahnya bertambah berkat kerjasama antara pemerintahan Kasunanan, *Goebnememen* dan desa. Dalam pendirian Sekolah Desa ini pihak Kasunanan memberikan bantuan biaya pembuatan gedung dan mebel, pihak *Goebnememen* memberikan peralatan mengajar seperti buku-buku, sedangkan pihak desa membayar gaji guru-gurunya.⁵⁷ Pengawasan terhadap kegiatan sekolah Desa dilakukan oleh *School Opsiner* dengan pangkat Panewu. Pada tahun 1933, kuasa Sekolah Desa diserahkan kepada pihak Kasunanan, dan ketika itu Kasunanan telah memiliki 66 Sekolah Desa. Dalam pelimpahan ini pihak *Goebnememen* memberikan subsidi bagi gaji guru-gurunya. Pada tahun 1938 jumlah Sekolah Desa yang tercatat ada 153 buah.⁵⁸

Selain Sekolah Desa, Kasunanan juga menyelenggarakan sekolah berdasarkan ajaran Islam dengan nama *Mambaul Ulum* (MU) yang didirikan pada tanggal 23 Juli 1905. Maksud pendirian sekolah ini, pertama untuk membentuk kader-kader ulama dan yang kedua untuk mendidik calon pejabat keagamaan yang ahli dan cakap dalam menjalankan tugasnya. Selain mempelajari bidang keagamaan secara mendalam, *Mambaul Ulum* juga mengajarkan berhitung, menggambar, menulis, bahasa Jawa, bahasa melayu dan Arab, serta ilmu pengetahuan lain. Padatnya kurikulum yang diajarkan tersebut, maka untuk menyelesaikan pendidikan diperlukan waktu 11 tahun yang terbagi menjadi tiga jenjang pendidikan. Pertama

⁵⁷*Ibid.*, hal. 46

⁵⁸*Ibid.*, hal. 32.

untuk tingkat ibtidaiyah: kelas I – IV, kedua tingkat Wasta: kelas I – IV, dan yang terakhir tingkat Ulya: kelas I – III.

Berbeda dengan sekolah model Barat, murid *Mambaul Ulum* memang berasal dari anak-anak *abdi dalem Mutihan*, tetapi dalam perkembangannya *putro sentono* dan anggota masyarakat lainnya diperkenankan masuk sekolah ini.

Khusus untuk Yogyakarta, memiliki perlu menjadi fokus perkembangan karena sejak sebelum perang dunia ke II, DIY merupakan tempat pendidikan yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga pendidikan baik yang berazaskan kebangsaan maupun agama. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan yang didirikan Ki Hajar Dewantara dengan tujuan tidak hanya mencerdaskan bangsanya tetapi juga untuk menumbuhkan perasaan nasionalisme pada anak-anak asuhnya. Lembaga ini sejak awal berdirinya telah menempuh jalan “berdikari” tidak pernah bersedia menerima bantuan dari pihak pemerintah Belanda. Orang-orang Islam terutama dari Muhammadiyah aktif pula dibidang ini, demikian pula halnya orang-orang yang beragama Kristen, baik dari Katholik maupun protestan. Semua lembaga pendidikan itu mendirikan sekolah-sekolah baik tingkat sekolah rakyat (dasar), maupun tingkat menengah. Setelah pengakuan kedaulatan mereka juga membuka lembaga pendidikan tinggi.

Untuk pendidikan dasar dan menengah ini lembaga pendidikan Kristen, yaitu Badan Oesaha Kristen Republik Indonesia (BOPKRI) telah pula melakukan kegiatan-kegiatannya. Hal itu telah dimulai sejak jaman perang, lembaga ini membuka sekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai sekolah-sekolah tingkah menengah baik tingkat pertama maupun tingkat atas. BOPKRI telah

memiliki tiga buah SMA dan dua SMEA. Golongan Katholik telah melakukan kegiatannya dan sekolah-sekolah dibawah asuhannya cukup banyak. Pendidikan dibawah golongan Katholik terkenal karena mutu dan disiplinnya. Dari sekian banyak sekolah-sekolah Katholik SMA (putri) Stella Duce dan SMA (putra) de Brito yang diakui masyarakat memiliki mutu yang tinggi.

Dilain pihak golongan Islam pun giat di dalam bidang ini. Gerakan Muhammadiyah sejak awal berdirinya telah memperhatikan bidan ini. Karena itu Muhammadiyah memiliki sekolah-sekolah yang banyak jumlahnya, baik yang bersifat umum maupun khusus. Gerakan Akmadiyah (Lahore) juga telah menggiatkan diri melalui lembaga pendidikannya, yaitu Perguruan Islam Tingkat Republik Indonesia (PIRI). Golongan ini juga telah memiliki sekolah-sekolah baik yang bersifat umum maupun kejuruan.

Sejalan dengan usaha pemerintah melakukan perbaikan dibidang pendidikan dasar dan menengah ini, maka di Yogyakarta didirikan sekolah pembangunan baik SMA Pembangunan maupun STM Pembangunan. Sekolah-sekolah pembangunan di Yogyakarta ini merupakan yang pertama kali didirikan oleh pemerintah. Sekolah-sekolah ini telah berjalan dengan baik.

Sejak awal kemerdekaan telah dirasa perlunya diselenggarakan perguruan tinggi untuk menampung anak-anak yang akan meneruskan pendidikannya. Untuk itu oleh beberapa pemimpin di Yogyakarta dibentuk Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada.⁵⁹ Setelah persiapan-persiapan selesai maka pada tanggal 3 Maret 1949 diumumkan berdirinya balai Perguruan Tinggi Gajah Mada oleh para

⁵⁹Republik Indonesia, *op cit.*, hlm. 732.

pendirinya dengan berstatus partikelir/swasta. Setelah mengalami proses akhirnya Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada ini diresmikan oleh pemerintah pada tanggal 19 Desember 1949. universitas ini telah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan ilmiah yang berupa seminar-seminar misalnya seminar Pancasila dan lain-lain.

Disamping UGM, di Yogyakarta telah berdiri pula beberapa universitas dan akademi IKIP negeri IAIN, UII, IKIP Sanata Dharma, STI-PPEP dan lain-lain. Sebagai akibat adanya lembaga pendidikan yang banyak itu dari luar Yogyakarta dan luar pulau Jawa pada setiap awal tahun ajaran banyak calon pendaftar ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka datang ke Yogyakarta terutama berusaha untuk memasuki UGM dan nantinya setelah berhasil diterima di universitas ini barulah mereka mencari yang lain. Berkumpunya pelajar/mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah itu ada keuntungan di dalam pembinaan bangsa Indonesia, baik sekarang maupun yang akan datang. Namun tidak jarang terjadinya hal-hal yang kurang baik seperti perkelahian antar suku-suku yang berkelompok di kampung-kampung. Bahkan perkelahian itu ada yang menimbulkan korban jiwa. Pertentangan di antara suku itu tidak jarang pula ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan golongannya. Banyaknya orang-orang pendatang yang berasal dari luar DIY dan luar Jawa juga turut berperan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat DIY. Sebagian masyarakat DIY memanfaatkan para pelajar pendatang dengan berdagang dan menyiapkan beberapa keperluan mereka selama mencari ilmu di DIY.

BAB III

PERUBAHAN SOSIAL DAN KOTA DI VORSTENLANDEN

Perkembangan pendidikan membawa pengaruh yang besar dalam konteks pergerakan rakyat. Pendidikan dapat dipandang sebagai sebuah dinamit bagi sistem kolonial. Pengaruh pendidikan terhadap masyarakat kolonial diakui sepenuhnya oleh penguasa-penguasa kolonial sendiri, dan menurut Colijn “merupakan tragedi politik kolonial, karena ia membentuk dan membangun kekuatan-kekuatan yang di kemudian hari akan melawan pemerintah kolonial”.⁶⁰ Alasan yang dikemukakan Colijn merupakan ekspresi dari penguasa kolonial yang merasa kepentingannya merasa terancam dan apa yang diperkirakan memang menjadi sebuah kenyataan yang tak terelakkan walaupun berjalan sangat lambat.

⁶⁰Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, Gramedia: Jakarta, 1993, hal. 60

Organisasi modern pertama pribumi adalah Boedi Oetomo yang terbentuk pada tahun 1908. Organisasi ini mewadahi para priyayi Jawa sebagai anggotanya dan berjalan sesuai dengan garis politik Ethis pemerintah kolonial. Hal ini dapat terlihat dalam permohonan organisasi Boedi Oetomo kepada pemerintah kolonial. Permohonan ini banyak memfokuskan pada bidang pendidikan yaitu (1) menyempurnakan pendidikan *Kweekscholen* dan O.S.V.I.A., (2) mempertahankan mutu pendidikan di S.T.O.V.I.A., (3) mendirikan sekolah-sekolah *Frobel*⁶¹ untuk anak-anak pribumi laki-laki dan perempuan dan membuka pintu sekolah-sekolah dasar Eropa bagi anak-anak pribumi, walaupun mereka tidak memahami bahasa Belanda atau jika tidak, mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak pribumi serupa dengan sekolah-sekolah Belanda-China, (4) mendirikan sekolah-sekolah dagang untuk pribumi termasuk kaum perempuan, (5) menyediakan lebih banyak tanah untuk sekolah-sekolah pertanian, (6) memberikan beasiswa kepada murid-murid pribumi, (7) memberi izin penyelenggaraan undian (dengan tujuan mengumpulkan dana beasiswa, dan (8) memberi izin Boedi Oetomo mendirikan sekolah-sekolah desa.⁶²

Perkembangan dari permohonan yang diajukan oleh Boedi Oetomo memang sangat lamban di respon oleh pemerintah kolonial. Sehingga memunculkan ide-ide untuk membangun sekolah-sekolah yang bebas dari intervensi pemerintah kolonial tetapi masih dalam garis politik Ethis. Secara umum bahwa pendirian sekolah-sekolah yang dilakukan oleh organisasi-

⁶¹Sekolah *frobel* merupakan sekolah bahasa, dimana murid akan diajarkan bahasa Belanda

⁶²Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*, Grafitti Press: Jakarta, 1989, hal. 85

organisasi pergerakan adalah didorong oleh pertentangan kepentingan sosial dengan penjajah, karena perbedaan rasial pertentangan tersebut menjadi lebih serius. Selain itu bahwa sekolah merupakan lahan yang tepat bagi perekrutan kader-kader yang terdidik, sehingga organisasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang dituju.

Sejak dekade pertama abad ke-20 telah bermunculan sekolah-sekolah partikelir. Sekolah-sekolah partikelir ini tidak hanya didirikan oleh kaum pergerakan Hindia Belanda, tetapi juga banyak dilakukan oleh komunitas China di Hindia Belanda. Mengenai munculnya sekolah swasta yang dilakukan oleh pribumi dapat dilihat yaitu perkembangan sekolah-sekolah swasta Boedi Oetomo yang mendirikan perhimpunan *Neutraal Onderwijs* (Sekolah Netral) sebagai pengumpul dana bagi pendirian sekolah Boedi Oetomo dan telah berhasil mendirikan tiga buah sekolah di kota Jogjakarta dua buah dan satu buah di Soerakarta.⁶³

Organisasi lain yang pertumbuhannya melalui bidang sosial dan keagamaan adalah Muhammadiyah, yang sejak didirikan pada tahun 1912 sampai tahun 1925 mempunyai anggota 4000 orang, mampu mendirikan 55 sekolah dengan 4000 orang murid.⁶⁴ Sekolah-sekolah partikelir banyak didirikan oleh organisasi Islam sebagai bentuk penjagaan umat Islam dari makin masifnya

⁶³*Soembangsih, Gedenkboek Boedi Oetomo, 1908-1918*, Tijdschrift Nederlandsche Oud & Nieuw, Amsterdam, 1918, hal. 17, dalam Pitut Soeharto dan A. Zainul Ihsan, *Cahaya di Kegelapan: Capita Selecta Kedua, Boedi Oetomo dan Sarekat Islam Pertumbuhannya dalam Dokumen Asli*, Aksara Jayasakti: Jakarta, 1982, hal.131.

⁶⁴M.C. Ricklefs, *Op.Cit.*, hal. 260, lihat juga Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES: Jakarta, 1996, hal. 95.

penetrasi para *zending* (misionaris) dalam penyebaran agama Kristen. Pendidikan yang dibangun oleh para misionaris Kristen melalui sekolah-sekolah mampu menghasilkan guru-guru agama Kristen dari kalangan bumiputra. Selain itu pendirian sekolah-sekolah oleh para misionaris ini didukung oleh pemerintah kolonial melalui subsidi pendidikan yang diberikan kepada sekolah-sekolah tersebut.

Tumbuh dan berkembangnya sekolah-sekolah partikelir juga disebabkan kurangnya pemeritah kolonial Belanda di dalam menyediakan sarana pendidikan bagi anak-anak di Hindia Belanda. Dalam publikasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pengajaran Hindia Belanda No. 12 halaman 7b disebutkan bahwa bila kita memperbandingkan perluasan pengajaran sejak tahun 1920 dengan bertambahnya jumlah penduduk sejak tahun yang sama kita akan melihat bahwa pengajaran sekolah dasar dalam bahasa Belanda, betapapun jumlah sekolah itu diperbanyak masih saja terlalu sedikit bila dibandingkan dengan penduduk yang berjuta-juta itu. Dan pengajaran yang biasa pun jauh terbelakang dengan besarnya penambahan penduduk.⁶⁵

Masalah-masalah pendidikan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pergerakan mendapatkan sebuah perhatian yang besar setelah tahun 1920-an. Hal ini dikarenakan pada tahun 1920-an perubahan-perubahan ekonomi dan sosial semakin terasa menghimpit masyarakat Hindia Belanda. Selain itu banyaknya sekolah partikelir yang didirikan pada masa ini dilakukan karena biaya anggaran untuk pendidikan dipangkas sebagai akibat dari memburuknya kondisi

⁶⁵M.C. Ricklefs, *Op.Cit.*, hal. 260, lihat juga Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES: Jakarta, 1996, hal. 95.

perekonomian Hindia Belanda. Padahal dapat terlihat bagaimana kecilnya dana pendidikan bila dibandingkan dengan keuntungan perdagangan Hindia Belanda dalam tabel 1.

Memang dalam laporan pemerintah kolonial bahwa masyarakat masih mengutamakan sekolah negeri milik pemerintah baru bila hal ini sulit terjangkau biasanya masyarakat akan memilih sekolah swasta bersubsidi dan sekolah swasta yang tidak mendapat subsidi dari pemerintah kolonial.

Tabel. 1. Anggaran Belanja Pengajaran⁶⁶

Tahun	Anggaran Belanja <i>Onderwijs</i> (Pengajaran)
1848	0,25 Juta
1854	1,50 juta
1911	9,70 juta
1915	14,9 juta
1920	28,4 juta
1925	37,7 juta

⁶⁶*Sejarah Onderwijs (Pengajaran) Kolonial*, diterbitkan oleh Perhimpunan Peladjar-Peladjar Indonesia (*Indonesische Studenten Unie*), Januari 1933, dalam Pitut Soeharto dan A. Zainul Ihsan, *Op.Cit.*, hal. 183. Bandingkan dengan tabel 1 mengenai Pertumbuhan Perdagangan di Hindia Belanda.

Sekolah-sekolah swasta tidak bersubsidi banyak dibangun oleh kaum pergerakan yang berfungsi selain memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat pribumi yang tidak tertampung di sekolah milik pemerintah kolonial, juga sebagai tempat perekrutan kader bagi organisasi pergerakan tersebut. Memang tidak semua sekolah yang dibangun oleh kaum pergerakan sebagai pemenuhan akan kader yang terdidik, tetapi sebagian besar memiliki tujuan dari keprihatinan akan minimnya aksesibilitas masyarakat pribumi akan pelayanan pendidikan oleh pemerintah kolonial.

Sedangkan pemerintah kolonial Belanda sendiri memiliki tujuan yang berbeda untuk bidang pengajaran ini. Pemerintah mengharapkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar maka dengan pengajaran bahasa Belanda maka buku-buku yang mereka baca dapat mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang-barang yang dihasilkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Artinya bahwa motif keuntungan ekonomi sangat diutamakan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam menghasilkan lulusan pendidikannya.

Tumbuhnya sekolah-sekolah partikelir ini dikarenakan dua hal yaitu kurangnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah kolonial Belanda bagi masyarakat. Tujuan kedua adalah tujuan pendidikan kolonial yang jauh dari harapan Artinya bahwa kaum pergerakan nasional ingin merubah maksud dan tujuan dari pendidikan kolonial dengan pendidikan yang lebih selaras dengan kebutuhan penghidupan rakyat dengan mendirikan sekolah partikelir.

3.1. PERUBAHAN SOSIAL DI VORSTENLANDEN

Campur tangan dan intervensi dari VOC tidak hanya sebatas perdagangan namun memasuki wilayah politik kerajaan. Pada tahun 1800 dibentuklah pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Hal tersebut mempengaruhi struktur sosial yang terbentuk dalam masyarakat. Klasifikasi dalam masyarakat mengalami pergeseran, etnis Asia pendatang menjadi lebih tinggi daripada pribumi karena dukungan penjajah. Kelompok ini mendominasi bidang ekonomi perdagangan kota. Yang menempati struktur tertinggi dalam masyarakat bukan lagi golongan raja dan bangsawan namun pemerintah Belanda. Pengaruh etnis pendatang tersebut makin lama makin kuat mempengaruhi kehidupan masyarakat kota, menyangkut aspek gaya hidup, bahasa, seni, dan perilaku sosial. Namun demikian, kharisma kraton masih dihormati dalam kehidupan yang semakin kompleks tersebut.

Adapun secara lebih spesifik, perkembangan klasifikasi sosial Vorstenlanden khususnya Surakarta dapat diamati sebagai berikut:

Tabel 2 Perubahan Struktur Sosial Masyarakat

No	Periode	Klasifikasi Sosial	Penguasa
1	Pra Kerajaan	Homogen (tak ada klasifikasi)	Bekel
2	Masa Kerajaan	Pemimpin (raja), Bangsawan, Abdidalem, Rakyat (hirarkhis)	Raja
3	Pemerintah Kolonial Belanda	Bangsa Belanda, raja dan kerabatnya, bangsa Timur Asing, Pribumi (secara hirarkhis)	Pemerintah Kolonial Belanda
4	Kemerdekaan RI (1945 – 1965)	Heterogen, klasifikasi sosial mudah melemah	Pemerintah RI (walikota)
5	Orde baru (1966 – 1998)	Tak ada klasifikasi sosial hirarkhi namun horizontal	Pemerintah RI (walikota)
6	Reformasi (1999 - sekarang)	Tak ada klasifikasi sosial (heterogen)	Pemerintah RI (walikota)

Sumber: Zaida dan Arifin (2010)

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam waktu kurang lebih 20 tahun itu amat banyak dan meliputi hampir semua bidang kehidupan masyarakat. Beberapa contohnya adalah kekuasaan pemerintahan Belanda diganti kekuasaan Jepang sebagai *upper class* diganti golongan militer Jepang sebagai *rulling class* yang kemudian jatuh karena revolusi nasional, golongan kaum politik nasional yang pada zaman Belanda ditempatkan sebagai *opponent* pangreh pradja mendapat kekuasaan pemerintahan di atas pangreh pradja, sistem sosial yang biasanya berorientasi pada kewibawaan generasi dewasa dan tua dengan cepat berubah menjadi sistem sosial yang mengikuti arah perkembangan generasi muda.⁶⁷

Tata hubungan yang berstratifikasi antar para anggota masyarakat Jawa di Yogyakarta dimana dulu dan sekarang. Tercemin antara lain dalam penggunaan bahasa Jawa. Bahasa ini sesungguhnya terdiri dari tiga sub bahasa yang berbeda bukan dialek dan masing-masing mempunyai perbendaharaan kata sendiri. Akan tetapi ketiganya memakai tata bahasa dan sintaksis yang sama. Perbedaan-perbedaan halus dalam tingkat perhormatan dan penghargaan yang harus ditunjukkan oleh seseorang kepada orang lainnya. Pada pilihansub bahasa, orang Jawa menunjukkan statusnya dalam hubungan dengan lawan bicaranya.

Dalam berbicara dengan seseorang yang statusnya lebih tinggi, orang Jawa harus menggunakan karma hinggil atau sub bahasa yang sifatnya untuk penghormatan. Status yang lebih tinggi ini didasarkan pada tata hubungan, usia

⁶⁷*Ibid.*, hlm. ix.

atau status dalam hierarki biokrasi.⁶⁸ Sub-bahasa kedua adalah *krama madya* atau sub-bahasa menengah yang harus digunakan oleh orang-orang yang sederajat. Penduduk Yogyakarta sebagian besar lebih suka menggunakan *krama hinggil*. Penggunaan sub-bahasa ini dianggap lebih sopan dan menyenangkan orang yang diajak berbicara dalam berhubungan dengan orang lain yang statusnya sama. Namun jika kedua hubungan kedua pihak sudah sangat akrab, mereka harus menggunakan *krama madya* atau bahkan sub bahasa yang lebih rendah. Sub-bahasa yang lebih rendah atau *ngoko* digunakan untuk berbicara dengan orang-orang yang statusnya lebih rendah dari pembicara. Dalam banyak hal, *Ngoko* hanya digunakan jika terdapat jarak sosial yang cukup jauh antara kedua pihak yang berinteraksi atau jika salah seorang diantaranya berada dalam hubungan keluarga yang lebih rendah. Sub-bahasa ini umumnya dipergunakan oleh majikan pada para pelayannya.

Jadi, sistem yang berstratifikasi ini menyangkut penggunaan dua sub-bahasa yang berlainan, yaitu jika dua pihak yang status sosialnya berbeda sedang berinteraksi. Komunikasi dari tingkat lebih tinggi ke lebih rendah dilakukan dengan *ngoko*, sedangkan sebaliknya dengan *krama hinggil*.⁶⁹

Stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat di Yogyakarta sangat berhubungan dengan kedudukan keraton dalam struktur sosial di Jawa. Jika digambarkan dalam bentuk kerucut, sultan menempati posisi paling atas dari sistem pelapisan masyarakat. Urutan kedua ditempati oleh kerabat keraton atau

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 151.

⁶⁹*Ibid.*

sentana dalem. Kemudian menyusul pada urutan ketiga adalah mereka yang bekerja pada administrasi kasultanan maupun pemerintahan yang disebut *abdi dalem* atau kaum *priyayi*. Urutan terakhir adalah golongan wong cilik yang sering juga disebut sebagai rakyat jelata, baik penduduk kota maupun pedesaan. Mereka adalah pekerja yang tidak terdidik atau sedikit mendapat latihan kerja di perusahaan kecil.⁷⁰

Pada tahun 1916, penduduk kota tercatat 98.000 orang, tetapi jumlah masing-masing lapisan masyarakat itu tidak dapat diketahui dengan pasti. Meskipun tempat tinggal mereka sebagai kelompok masyarakat dapat ditunjukkan dalam struktur fisik kota. Pada tahun di Kota Yogyakarta yang sama terdapat lebih kurang 10.000 orang asing pendatang, terdiri dari orang arab (500 orang), orang Belanda (2.000 orang) dan orang cina (7.500 orang). Pendatang-pendatang yang bermukim di Yogyakarta terutama yang memangku jabatan pemerintahan dan swasta, menggunakan waktu senggangnya untuk memperhatikan peninggalan keurbakalaan yang banyak terdapat di sekitar Yogyakarta.⁷¹

Didalam daerah atau kerajaan agraris baik kedudukan maupun perencanaan sangat ditentukan oleh luas sempitnya kepemilikan tanah. Pemilik tanah sebagai penanggung beban kepada pemerintah kolonial mempunyai tugas berat yaitu membayar pajak *natura*, *inatura* dan uang.⁷² Stratifikasi social dikalangan petani

⁷⁰ Adurrachman Suryomihardjo, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008). hlm.29.

⁷¹ Selo Soemardjan, *op.cit.*, hlm. 29

⁷² Suhartono, *Bandit-Bandit Pedesaan Di Jawa Studi Historis 1850-1942 Di Jawa*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hlm. 38.

didasarkan atas penguasaannya terhadap tanah.⁷³ Golongan yang menguasai tanah disebut *sikep*. Mereka yang menanggung beban-beban atas tanah. Dibawah golongan *sikep* terdapat kelas petani yang rendah golongan *manumpang* dan *bujang* yang tidak dibebani apa-apa oleh negara.

Menurut tradisi Jawa, pada dasarnya raja dianggap sebagai pemilik tanah tertinggi. Bahkan ditegaskan sejak dahulu di kerajaan Jawa kekuasaan raja sedemikian besarnya sehingga dapat mempengaruhi rakyat diatas hak miliknya yang menentukan hidup mati, dengan demikian tanah raja (*Keagungan Dalem Nata*) sedang rakyat hanya mengaduk saja.⁷⁴ Sebagai pemilik tanah raja meyerahkan tanahnya kepada kawulanya yaitu rakyat untuk digarap. Suatu prinsip yang menyertai penyerahan tanah milik kepada orang lain untuk digarap, yang sudah tua dan berlaku dimanapun ialah azas bagi hasil $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ hasil untuk pemilik dan $\frac{1}{2}$ untuk pengarap tanah.

Bermula dari kerangka pikir seperti itulah maka di Jawa dan DIY tata susunan masyarakatnya pun mengenal lapisan-lapisan (*strata*) yang didasarkan atas hak dan kewajiban serta pemilikan tanah. Didalam masyarakat agraris tanah merupakan dasar stratifikasi sosial, sehingga kebutuhan atas tanah sangat diperlukan demi status sosialnya. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa orang yang menguasai tanah adalah orang yang mempunyai status sosial yang tinggi, jika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai tanah.

⁷³Onghokham, *Penelitian Sumber-sumber Gerakan Mesianis, Dalam Prisma 1 Januari 1977*, (Jakarta: LP3ES, 1977), hlm.15.

⁷⁴Gatot Muniatmo, et. al., *Pola Penguasaan, Pemilikan dan penggunaan tanah Secara Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Departemen P&K Direktorat Jendral Kebudayaan, 1989), hlm. 14.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa asal mulanya terjadi stratifikasi sosial dalam masyarakat adalah karena adanya sesuatu yang dihargai atau yang dianggap berharga didalam masyarakat. Sesuatu yang berharga tersebut didalam masyarakat luas dapat berupa uang, benda-benda yang bernilai ekonomis, tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesolehan dalam agama, atau darah sebagai keturunan bangsawan.⁷⁵ Stratifikasi sosial ada sejak manusia mengenal adanya kehidupan bersama dalam masyarakat. Tentu saja ukuran suatu barang yang dihargai berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Stratifikasi sosial mengakibatkan munculnya kedudukan dalam masyarakat. Jika hanya mempunyai sedikit sesuatu yang dihargai berarti mempunyai kedudukan yang rendah dan jika mempunyai banyak sesuatu yang dihargai berarti mempunyai kedudukan yang tinggi.

Penduduk Yogyakarta seperti halnya penduduk tradisional lainnya dapat dibedakan menjadi dua lapisan. Kelompok pertama disebut kaum *priyayi* yang terdiri dari kaum bangsawan dan elite birokrat, sedangkan lapisan kedua adalah *wong cilik* dan tinggal di daerah-daerah pingiran serta jumlahnya besar. Lapisan kedua ini terdiri dari petani, tukang pengrajin, pedagang kecil dan lain sebagainya.⁷⁶ Kaum *priyayi* dan *wong cilik* mempunyai perbedaan yang mendasar, yaitu masalah gaya hidup. Kaum *priyayi* mempunyai gaya hidup yang

⁷⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologis Suatu Pengantar*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 216.

⁷⁶Sartono Kartodirdjo, *Stratifikasi sosial Dari Masyarakat Tradisional Dan Kolonial, Dalam Lembaran Sejarah No.4*, (Yogyakarta: Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, 1969), hlm. 6.

serba gemerlap dan penuh dengan nilai simbolik. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jarak dan kewibawaan terhadap golongan yang dibawahinya.⁷⁷

Faktor pemilikan tanah merupakan dasar bagi terbentuknya stratifikasi sosial bagi masyarakat agraris, hal ini juga berlaku bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Meskipun data bagi pemilikan tanah untuk masing-masing penduduk tidak tersedia tetapi dilihat dari letak pemukiman dan mata pencarian mayoritas penduduk Yogyakarta adalah petani. Selain itu penduduknya ada yang menjadi pedagang, pengrajin, buruh pabrik, nelayan, dan sebagian kecil ada yang bekerja sebagai buruh di kota.

Perubahan ekonomi, politik, dan demografi yang terjadi sejak abad XIX mempengaruhi hubungan kekuasaan dan kekayaan di daerah pedesaan. Pada akhir abad XIX penduduk Yogyakarta mengalami peningkatan yang pesat dan keadaan ini diikuti oleh proses fragmentasi pemilikan tanah yang mempengaruhi struktur sosial yang ada. Selain itu ekonomi pasar mulai masuk dan lambat laun terjadi kecenderungan petani yang mempunyai lahan kecil untuk melepaskan hak milik atau hak penguasaan tanahnya kepada orang lain. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya beban yang ditanggung oleh penduduk berupa pajak dan layanan sosial, sehingga tidak jarang penduduk terlibat dengan lintah darat masalah utang piutang. Apabila mereka tidak dapat membayar maka harus menyerahkan tanahnya dan menjadi buruh tani kepada petani kaya.

⁷⁷Darto Harnoko, *Pergolakan Sosial Di Surabaya Pada Awal Abad XX, Studi Kasus Tanah Partikelir Dalam Patra-Widya seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya Vol.5 No.3*, (Surabaya: Patra-Widya, 2004), hlm. 16.

Seorang petani menggarap tanah dan dan penghidupan utama diperoleh dari situ. Bagaimana lekatnya petani terhadap tanah dapat terlihat dari istilah-istilah yang ia kaitkan pada cara-caranya menguasai tanah, ia menamai tanah itu sebagai tanah pusaka (*heirloom land*), dan *tanah yasa* (*self develoved land*). Oleh karena itu perbedaan kelas antar kaum petani didasarkan atas ia menguasai tanah. Petani penguasa tanah disebut sikep (mereka yang memikul atau menanggung beban tanah). Petani sikep mempunyai numpang (tanggungan), juga disebut bujang (belum menikah) yang merupakan lapisan terendah dalam lingkungan desa. Dalam hal makan dan tempat tinggal seorang petani numpang tergantung sepenuhnya terhadap sikep kepada siapa ia mempersembahkan seluruh pekerjaannya. Petani numpang tidak mempunyai kewajiban-kewajiban seperti pajak atau kerja bakti terhadap negara melainkan terhadap sikepnya, yang mungkin kadang-kadang menggunakan mereka untuk melakukan kerja bakti kepada negara. Oleh karena itu kewajiban pajak atau kerja bakti dibebankan kepada kaum petani penguasa tanah. Disamping sikep yang elite diantaranya kaum petani dan numpang ada golongan petani menengah. Petani numpang yang telah menikah dan telah lama melayani sikepnya diberi pembagian tanah dari tanah desa atau persekutuan.⁷⁸

Secara khusus, pada masa awal pertumbuhannya Kesultanan Yogyakarta menampilkan kerajaan Jawa yang kokoh karena sejak awal dibangun dan disusun atas dasar landasan pandangan dunia dan pemikiran kerangka konseptual yang berakar pada kebudayaan Islam-Jawa sebagai modal sosial dan kultural yang

⁷⁸*Ibid.*, hlm.10.

dimilikinya. Pandangan dan konsep raja dan kerajaan tidak dapat dipisahkan dari pandangan dunia kosmis-religio-magis orang Jawa terhadap kehidupan dan alam semesta di jagad raya ini. Ajaran pra-Islam dan Islam lebur dalam pandangan dunia Kraton yang tercermin dalam konsep tentang kekuasaan, kedudukan, fungsi, tugas, citra raja, dan kerajaan yang ideal, serta konsep Kerajaan (*Negari*, *State*, *Kingdom*), Raja (*Kingship*), dan Tata Pemerintahan Kerajaan (*Paprentahan*, *Kaprajan*, *Statecraft*), yang hingga masa kini masih menjadi landasan kehidupan Kraton Yogyakarta.

Sikap adaptif Sultan HB VII dan HB VIII terhadap pengaruh pendidikan dan kebudayaan Barat serta kelahiran nasionalisme Indonesia pada awal abad ke-20 telah menjadikan kota Yogyakarta tumbuh menjadi salah satu kota pusat pembaruan, modernisasi dan nasionalisme di Indonesia. Dengan menjadi daerah *Vorstenlanden*, kraton dan masyarakat Kesultanan Yogyakarta masih dapat mempertahankan keberadaannya sebagai pusat kebudayaan Jawa. Kekuasaan politik memang telah merosot, tetapi otoritas budaya Jawa masih hidup. Ini merupakan salah satu modal sosial-kultural yang menjadikan salah satu keunikan survivalitas sosio-kultural masyarakat Yogyakarta dalam sejarah Jawa. Sejak menjadi daerah *Vorstenlanden*, masyarakat Yogyakarta menyesuaikan diri terhadap perubahan dan pembaharuan yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Proses Westernisasi dan Modernisasi tidak terkecuali masuk ke wilayah ini. Sejak 1900-an unsur-unsur pendidikan modern (Barat), alam pemikiran Barat, gagasan, semangat, dan ideologi politik dan kultural Barat, tumbuh dan berkembang di lingkungan kota Yogyakarta. Secara dinamis kota Yogyakarta

berkembang menjadi "kota kolonial" ("*colonial city*"), yang menjadi embrio kota "**Indonesia Baru**". Penduduk kota menjadi semakin plural (Eropa, Cina, Arab, Jawa dan etnis lainnya) dan unsur budayanya menjadi semakin beragam. Namun terdapat kecenderungan terjadinya hibrida kebudayaan yang menuju ke arah terbentuknya kebudayaan "Indonesia Baru" yang tengah berkembang di Yogyakarta. Dengan kata lain semenjak itu kota Yogyakarta, menunjukkan keistimewaannya, tumbuh menjadi enbrio Pusat Kebudayaan "Indonesia Baru", dan sekaligus juga menjadi "Kota Pergerakan Nasional", "Kota Pendidikan", karena berkembangnya pendirian sekolah-sekolah baik yang didirikan oleh pemerintah maupun yang didirikan oleh organisasi swasta, seperti Misi, Zending, Pergerakan Muhammadiyah, Taman Siswa, Budi Utpmo dan lainnya. Demikian halnya dengan pendirian Rumah Sakit dan klinik-klinik kesehatannya. Pada saat yang sama Yogyakarta tumbuh dan berkembang menjadi pusat kegiatan pergerakan nasional, ditandai dengan digunakannya kota Yogyakarta menjadi tempat kongres Budi Utomo, dan tempat kelahiran Pergerakan Muhammadiyah (1912), Taman Siswa, dan tempat kegiatan pergerakan lainnya, termasuk pergerakan kaum perempuan dan pemuda Indonesia Dengan demikian perkembangan Vorstenlanden selama periode 1830-1940-an pada hakekatnya telah menjadikan Kraton Yogyakarta berperan menjadi katalisator transformasi masyarakat dan kebudayaan baru di Indonesia sampai masa berakhirnya penjajahan Belanda.⁷⁹

⁷⁹ Djoko Suryo, Dari Vorstenlanden ke DIY: Kesenambungan dan Perubahan, Konferensi Nasional Sejarah IX, Jakarta, 5-7 Juli 2011, hal. 13 - 14

3.2. PERUBAHAN KOTA DI VORSTENLANDEN

Pasca kedatangan kolonialisme, konstruksi kota-kota di beberapa wilayah mengalami pergeseran terutama terkait dengan berbagai kebijakan kaum kolonial untuk melakukan dekonstruksi terhadap kebudayaan masyarakat tradisional. Salah satu kebijakan itu adalah, membangun kota-kota di kepulauan Jawa layaknya kota-kota yang ada di kerajaan Belanda. Konsekuensi yang paling dominan dan ada adalah terjadinya pemindahan karakter dan budaya borjuasi Belanda ke Indonesia (dengan berbagai upayanya) dan berimplikasi pada terbangunnya konstruksi baru, dimana yang berkembang kemudian adalah kota Timur yang khas, sebagai bentuk dari proses akulturasi yang sangat instruktif.

Sistem monopoli Hindia Belanda, membuat keberadaan sifat borjuasi Belanda yang bebas, menjadi tidak mungkin. Sehingga bentuk-bentuk administrasi sekalipun lebih bersifat autokratik. Para pegawai kompeni tetap memakai statusnya sebagai pedagang namun cara hidup mereka tidak kurang dari cara hidup bangsawan. Bahkan cara hidup orang-orang kelas bawah pun mengalami proses adaptasi dengan pola perkembangan kota yang semakin modern (mestizoe). Dan untuk berbagai bangunan fisik yang ada, kota-kota itu mulai mengalami perombakan dengan masuknya elemen-elemen Eropa bersamaan dengan elemen tradisional (Jawa). Disinilah letak upaya kaum kolonial untuk tetap mempertahankan prestise kolonialisme mereka dalam suatu masyarakat yang didominasi oleh sistem yang feodal. Kolonialisme tidak hanya terefleksi dalam segregasi yang sangat besar dalam tempat tinggal yang ditempati oleh berbagai

kelompok penduduk perkotaan, tetapi juga dalam perjuangan mereka untuk memperoleh lingkup kehidupan antara lain terungkap dalam aspek eksternal kota-kota itu.⁸⁰ Sehingga pasca kekuasaan kolonialisme, kecenderungan untuk melanjutkan pembangunan kota-kota di Indonesia lebih didominasi oleh latar belakang historis seperti yang telah dikemukakan diawal tadi, dimana tradisi keIndonesiaan tetap ada, entah bisa dalam bentuk berupa sisa-sisa peninggalan kekuasaan tradisi kemudian pengaruh kolonialisme (Eropa) yang telah meletakkan konsep kota-kota modern dan ditambah dengan beberapa tradisi kaum pendatang yang kemudian mampu untuk tetap eksis bahkan seringkali mereka menjadi pelaku utama dalam roda perekonomian⁸¹

Pembentukan birokrasi kolonial yang kemudian berpengaruh terhadap bentuk administrasi kolonial, khususnya di daerah Surakarta pada masa pemerintahan Paku Buwono X (antara tahun 1893-1939) terjadi perubahan wajah kota dari kota homogen menjadi kota heterogen. Perkembangan kota Surakarta pada masa ini, dapat dikatakan mengacu pada dua tipe perkembangan kota, yaitu kota kosmologi dan kota ekologi⁸² Perkembangan menjadi kota kosmologi akan berpengaruh terhadap perubahan struktur sosial, misalnya differensiasi komunitas sosial, eksklusifisme sosial, dan proletarisasi. Sedangkan perkembangan menjadi kota ekologi berpengaruh terhadap perubahan struktur ruang kota seperti pembangunan infrastruktur ekonomi, pembangunan infrastruktur budaya,

⁸⁰W.F. Wertheim, 1998 : 133-143

⁸¹Marbun, 1995. Kota Indonesia di Masa depan. Erlangga. Jakarta, hal. 85

⁸²Kuntowijoyo. 2000. *The Making of A Modern Urban Ecology: Social and Economic History of Solo 1900-1915*. Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

perkembangan transportasi kota, *urban development*, dan reorganisasi agraria kota.

Tabel 3. Perubahan Tata Ruang Surakarta

No	Periode Tata Ruang	Bentuk/ Pola	Orientasi	Landuse
1	Pra-Kerajaan	Linier	Rumah Ki Gede Sala, Bengawar Solo, Pasar	Pertanian, perdagangan, pemukiman
2	Kasunanan Surakarta Hadiningrat	Linier	Lingkungan Kraton dan mangkunegara	Pertanian, perdagangan, pemukiman, pertahanan, pemerintahan
3	Pemerintah Kolonial Belanda	Rectalinier atau grid	Kompleks kraton, Mangkunega-ran, Benteng Vastenberg dan Gubernuran	Perkebunan, perdagangan, industri, pemukiman, pertahanan, pemerintahan
4	Kemerdekaan RI (1945-1965)	Rectalinier, radiocentris	Kompleks kraton, Mangkunega-ran, balaikota, Pasar Gede, kampung Baru	Industri, perkantoran Perdagangan, Pemukiman, Pertahanan, pemerintahan
5	Orde Baru (1966-1998)	Rectalinier, kompleks	Kompleks kraton, Mangkunega-ran, balaikota, Pasar Gede, kampung Baru	Industri, perkantoran Perdagangan, Pemukiman, Pertahanan, pemerintahan
6	Reformasi (1999-sekarang)	Rectalinier, kompleks	Kompleks kraton, Mangkunega-ran, balaikota, Pasar Gede, kampung Baru	Industri, perkantoran Perdagangan, Pemukiman, Pertahanan, pemerintahan

Sumber: Zaida dan Arifin (2010)

BAB IV

KESIMPULAN

Pendidikan di Vorstenlanden terutama pada masa politik etis di satu sisi menghasilkan beberapa pegawai Belanda yang cakap dan setia, tetapi juga menghasilkan kaum elit nasional yang tidak puas yang memimpin gerakan-gerakan anti-penjajahan sebagai tonggak era yang dikatakan sebagai kebangkitan nasional.

Perkembangan Vorstenlanden selama periode 1830-1940-an pada hakekatnya telah menjadikan Kraton Yogyakarta berperan menjadi katalisator transformasi masyarakat dan kebudayaan baru di Indonesia sampai masa berakhirnya penjajahan Belanda. Kota Yogyakarta, menunjukkan keistimewaannya, tumbuh menjadi embrio Pusat Kebudayaan "Indonesia Baru", dan sekaligus juga menjadi "Kota Pergerakan Nasional", "Kota Pendidikan",

karena berkembangnya pendirian sekolah-sekolah baik yang didirikan oleh pemerintah maupun yang didirikan oleh organisasi swasta, seperti Misi, Zending, Pergerakan Muhammadiyah, Taman Siswa, Budi Utomo dan lainnya.

Kolonialisme telah menyebabkan perubahan stratifikasi sosial di Vorstenlanden Surakarta dan Yogyakarta yaitu golongan Belanda, Timur Asing, bangsawan dan pribumi biasa, dan dapat dikatakan terjadi pergeseran dari homogen menjadi heterogen.

Perkembangan kota hingga saat ini dapat dikatakan mengacu pada dua tipe perkembangan kota, yaitu kota kosmologi dan kota ekologi. Perkembangan menjadi kota kosmologi akan berpengaruh terhadap perubahan struktur sosial, misalnya differensiasi komunitas sosial, eksklusifisme sosial, dan proletarisasi. Sedangkan perkembangan menjadi kota ekologi berpengaruh terhadap perubahan struktur ruang kota seperti pembangunan infrastruktur ekonomi, pembangunan infrastruktur budaya, perkembangan transportasi kota, *urban development*, dan reorganisasi agraria kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman Suryomihardjo, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008)
- Arsip tentang *Officieele Toelichting op de Regelen Aangande de Rechten, Bevoegdheden en Verplichting van Het Land Eenerzijds en van Het Nkoe Alamzche Zelfbestuur Anderzijds*
- Baudet H. dan I.J. Brugmans, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1987)
- Larson, George D. *Masa Menjelang Revolusi : Keraton dan Kehidupan Dunia Politik di Surakarta 1912-1942*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1990)
- Best, John W. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982)
- Biiblad op Het Staatblad van Nederlandsch-Indie, Cet. LXXII*, Batavia, Landsdrukkerij, 1936
- Buku Induk HIS Pamardi Putri*, 1927
- Darto Harnoko, *Pergolakan Sosial Di Surabaya Pada Awal Abad XX, Studi Kasus Tanah Partikelir Dalam Patra-Widya seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya Vol.5 No.3*, (Surabaya: Patra-Widya, 2004),
- Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik I*, (Medan: Dwipa, 1995)
- Djoko Suryo, *Penduduk Dan Perkembangan Kota Yogyakarta 1900-1990, Kota Lama, Kota Baru*, (Yogyakarta: Ombak, 2005)
- Djoko Suryo, *Dari Vorstenlanden ke DIY: Kesenambungan dan Perubahan, Konferensi Nasional Sejarah IX*, Jakarta, 5-7 Juli 2011
- Gatot Muniatmo, et. al., *Pola Penguasaan, Pemilikan dan penggunaan tanah Secara Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Departemen P&K Direktorat Jendral Kebudayaan, 1989)
- Gottschalk, Louis, *Understanding History*, terj. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1975)
- Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007)

- KabarPaprentahan*. (Reksopustoko Mangkunegaran, 1932)
- Kuntowijoyo. 2000. *The Making of A Modern Urban Ecology: Social and Economic History of Solo 1900-1915*. Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM
- Marbun, 1995. *Kota Indonesia di Masa depan*. Erlangga. Jakarta
- Marwati Djoened Poesponegoro, et. El. *Sejarah Nasional Indonesia V*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1993)
- Nagazumi, Akira *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908-1918. terj.* (Jakarta : Pusat Grafitti Press, 1989)
- Narpowandowo*, No. 1. 1929
- Opgave Van Openbare Onderwijsrichtingen in Het Gewest Soerakarta*. (Surakarta : Arsip Mangkunegaran, 1931)
- Onghokham, *Penelitian Sumber-sumber Gerakan Mesianis, Dalam Prisma 1 Januari 1977*, (Jakarta: LP3ES, 1977)
- R. Moh Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2005)
- Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. Third Eds. (Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave, 2001)
- Ricklefs, M.C., 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi
- Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi*, (Jakarta: Gramedia, 1987)
- Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993)
- Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, Gramedia: Jakarta, 1993
- Sartono Kartodirdjo, *Stratifikasi sosial Dari Masyarakat Tradisional Dan Kolonial, Dalam Lembaran Sejarah No.4*, (Yogyakarta: Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, 1969)
- Selo Soemarjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gama Press, 1991
- S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Di Indonesia*. (Bandung: Jemmars, 1983)

- S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- Sidi Gazalba, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1996)
- Soerjono Soekamto, *Sosiologis Suatu Pengantar*, (Jakarta: UI Press, 1981)
- Suci Nur Aini Zaida dan Nurhayati H. S. Arifin, *Surakarta: Perkembangan Kota Sebagai Akibat Pengaruh Perubahan Sosial Pada Bekas Ibukota Kerajaan Di Jawa*, Jurnal Lanskap Indonesia Vol. 2 No. 2 (2010)
- Suhartono, *Bandit-Bandit Pedesaan Di Jawa Studi Historis 1850-1942 Di Jawa*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995)
- Thomas J. Lindblad, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*. (Jakarta: LP3ES, 2000)
- Vorstenlanden, Wikipedia, diakses dari <http://nl.wikipedia.org/wiki/Vorstenlanden>

LAMPIRAN